

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**CINDY OLIVIA
NIM. 220802085**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CINDY OLIVIA
NIM : 220802085
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : SAMAHANI, 30 April 2001
Alamat : Sukadamai Saree Kec Lembah
Seulawah Kab Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian dan dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Mei 2026

Yang menyatakan,



CINDY OLIVIA

220802085

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

CINDY OLIVIA

Nim.220802085

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

SKRIPSI

CINDY OLIVIA

NIM.220802085

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

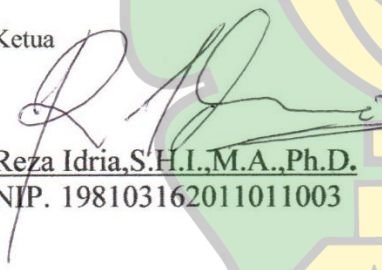
Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026 M

19 Dzulqaidah 1447 H


Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

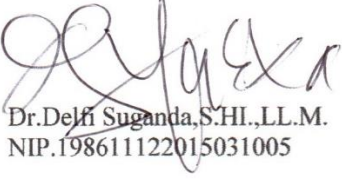
Ketua


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

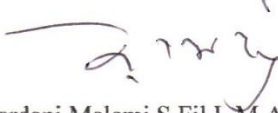
Sekretaris


Ferry Setlawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001

Penguji I


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Penguji II


Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P.
NIP. 198105052011011004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kewajiban penerapan SIPD sebagai sistem terintegrasi nasional yang menggantikan aplikasi sebelumnya namun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana kualitas implementasi SIPD berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta bagaimana kualitas sistem, informasi, layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih dalam praktik di BPKA Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, namun implementasinya belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan fitur seperti infaq, gangguan server, serta komunikasi teknis yang belum maksimal. Meskipun kompetensi aparatur relatif memadai, keterbatasan infrastruktur dan jaringan mempengaruhi efektivitas layanan. Secara keseluruhan, SIPD berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun memerlukan perbaikan pada aspek teknis, pelatihan, dan dukungan sistem agar implementasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya perbaikan yang diperlukan mencakup peningkatan kapasitas server, penyediaan

fitur yang sesuai kebutuhan daerah, penguatan koordinasi antarunit, serta pelaksanaan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur agar pemanfaatan sistem dapat berjalan optimal dan mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar evaluasi kebijakan dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pusat ke depan secara komprehensif.

Kata Kunci : *SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi Kebijakan*



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk sebagai syarat kewajiban studi agar dapat meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam penulisan ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan semangat terhadap peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc. Selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

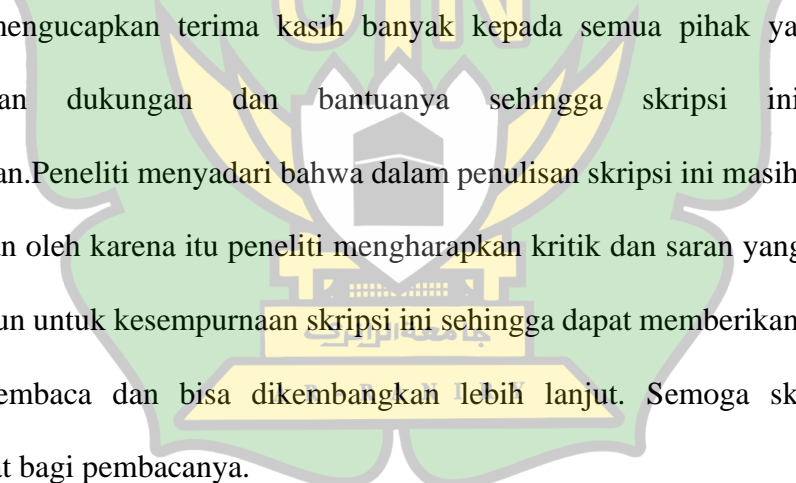
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed., selaku wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry .
5. Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D. selaku wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi dan bimbingan kepada peneliti.
6. Muazinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
8. Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan dalam pembuatan skripsi.
9. Segenap seluruh Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan.
10. Pegawai dan staff Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang telah membantu memberikan data-data atau hasil-hasil wawancara yang konkrit yang dibutuhkan untuk peneliti.

11. Seluruh keluarga untuk setiap doa dan dukungan yang telah diberikan.

Kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih karena telah mendukung saya, selalu memberikan saya semangat serta doa yang tak pernah berhenti.terimakasih karena sudah memenuhi pendidikan hingga mendapatkan gelar S.A.P

12. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan dan sampai pada titik ini, melalui berbagai perjuangan emosional dalam prosesnya.

13. Teruntuk rekan dan sahabat-sahabat saya terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini.



Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

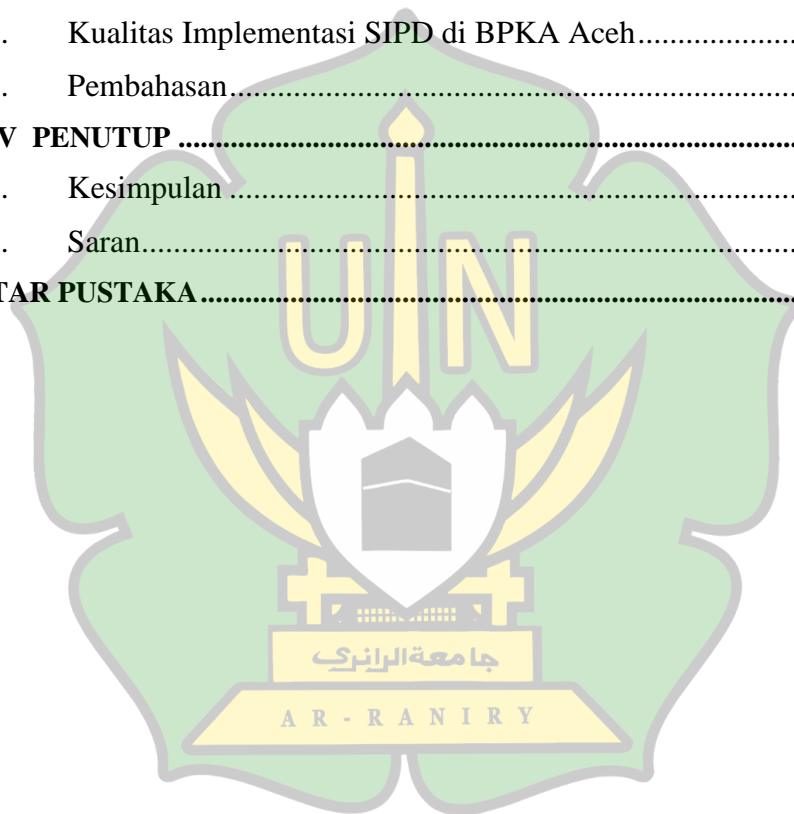
Banda Aceh, 06 Mei 2026
Peneliti

Cindi Olivia

DAFTAR ISI

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori.....	21
2.4. Kerangka Berpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Lokasi Penelitian.....	25
3.2. Jenis Penelitian.....	25
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.3.1 Data Primer.....	26
3.3.2 Data Sekunder	26
3.4. Informan Penelitian.....	27
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)	28
3.5.2 Observasi	29
3.5.3 Dokumentasi	29

3.6.	Teknik Analisis Data.....	29
3.6.1	Reduksi Data.....	30
3.6.2	Penyajian Data.....	30
3.6.3	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	30
3.7.	Teknik Analisis Data.....	31
3.8.	Sistematika Penulisan	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1.	Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	33
4.2.	Kualitas Implementasi SIPD di BPKA Aceh.....	39
4.3.	Pembahasan.....	62
BAB V	PENUTUP	77
5.1.	Kesimpulan	77
5.2.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		82



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir	24
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	28
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian	31
Tabel 4. 1 Ringkasan Status Indikator Implementasi SIPD di BPKA Aceh	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	38
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.....	39
Gambar 4. 3	Tampilan Login Aplikasi SIPD.....	50
Gambar 4. 4	Tampilan Beranda Aplikasi SIPD.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Lampiran 2. Daftar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada Pemerintah Aceh

Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan Fisip

Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Lampiran 5. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Terkait Penggunaan Aplikasi SIPD

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,¹ sebagaimana dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap daerah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai kerangka baku dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan pentingnya transformasi digital birokrasi.² Pada tingkat provinsi, Aceh menyesuaikan kebijakan pusat melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seluruh regulasi tersebut menegaskan bahwa SIPD wajib digunakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah demi meningkatkan akuntabilitas dan standarisasi data pemerintahan.³

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

² Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT).
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebelum penerapan SIPD, pemerintah daerah menggunakan berbagai aplikasi keuangan seperti SIMDA dan SIPKD yang berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksinkronan data, perbedaan format laporan, dan waktu penyusunan anggaran yang lebih lama. SIPD dikembangkan sebagai sistem terpusat yang menggantikan keragaman aplikasi sebelumnya. Dengan platform terintegrasi, pemerintah berharap efektivitas regulasi meningkat dan transparansi dapat diperkuat. Di Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) sebelumnya menggunakan SIPKD yang bersifat lokal dengan fleksibilitas penyesuaian dan fokus pada administrasi keuangan daerah. SIPD yang menggantikannya membawa cakupan lebih luas, mencakup perencanaan, keuangan, pembangunan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya dengan integrasi nasional, sinkronisasi proses penganggaran, kemudahan akses data, serta peningkatan akuntabilitas.⁴

Meskipun demikian, implementasi SIPD di BPKA Aceh menghadapi berbagai hambatan teknis dan kelembagaan. Salah satu masalah utama adalah absennya fitur tertentu seperti pengelolaan infaq, sehingga operator harus kembali menggunakan aplikasi SIPKD untuk mencetak dokumen tersebut. Akibatnya, alur administrasi menjadi ganda dan lebih lambat, bertentangan dengan fungsi SIPD yang seharusnya memusatkan seluruh data keuangan dan mempercepat pelayanan administrasi daerah. Permasalahan lain dalam implementasi SIPD di BPKA Aceh juga terlihat pada proses pencairan anggaran. Kendala utama berasal dari gangguan

⁴ Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Mengatur Tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

server yang menyebabkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh masing-masing SKPA tidak dapat diproses secara optimal oleh validator. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya alur pencairan anggaran, sehingga instansi harus menetapkan kebijakan pembatasan waktu pengantaran SPM, yaitu dari pukul 08.00 hingga 15.00. yang awalnya dari pukul 08.00 hingga 17.00. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap keterbatasan sistem sebelum terjadinya gangguan server yang lebih intensif, namun pada praktiknya tetap memengaruhi kelancaran dan kecepatan pelayanan administrasi keuangan daerah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat bergantung pada kualitas infrastruktur dan kompetensi pegawai. Studi di Kabupaten Probolinggo menemukan bahwa meskipun SIPD berhasil diterapkan, masih terdapat keterbatasan format laporan dan belum optimalnya analisis data.⁵ Penelitian di Kabupaten Bogor menegaskan bahwa kendala jaringan dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan utama dalam sinkronisasi data, sehingga beberapa proses tetap dilakukan secara manual.⁶ Hambatan ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan yang lebih kuat. Dengan status Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki struktur APBA yang kompleks, tantangan implementasi SIPD menjadi semakin besar.

⁵ Sundari Sundari, Sri Juni Woro Astuti, Esa Wahyu Endarti.(2023).“Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo”.MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik).Vol. 6,No(4), Hal 433-440.

⁶ Asep Hendra, Rivaldi Pradana.(2023).“Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”.Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah.Vol.15,No. (1),Hal 122-134

Penelitian ini menggabungkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta model keberhasilan sistem informasi DeLone & McLean yang menilai kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.⁷

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua kerangka teori tersebut secara simultan pada konteks Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus, struktur APBA yang lebih kompleks, serta kebutuhan fitur administratif seperti pengelolaan infaq yang belum terakomodasi di SIPD, sesuatu yang belum diulas mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPD di BPKA Aceh, sekaligus menawarkan strategi perbaikan yang realistis untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola keuangan pemerintah Aceh.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya integrasi sistem keuangan daerah akibat absennya fitur-fitur khusus Aceh seperti pengelolaan infaq dalam SIPD, sehingga BPKA

⁷ Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. (1992). *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable*. Cambridge, MA: MIT Press.

DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. (2003). *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. Cambridge, MA: MIT Press.

harus menggunakan dua aplikasi (SIPD dan SIPKD) secara bersamaan dan menimbulkan duplikasi proses administrasi.

2. Terjadinya penurunan efektivitas layanan keuangan daerah akibat gangguan server SIPD yang menghambat proses validasi SPM dari SKPA, sehingga memperlambat pencairan anggaran dan menyebabkan pembatasan waktu pengantaran SPM.
3. Kendala teknis dan keterbatasan infrastruktur seperti ketidakstabilan jaringan, serta kemampuan sistem yang belum mampu menangani kebutuhan daerah dengan kompleksitas APBA seperti Aceh, sehingga memperlambat sinkronisasi dan pelaporan.
4. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan belum optimalnya komunikasi serta dukungan kebijakan, yang mempengaruhi kesiapan aparatur dalam mengoperasikan SIPD dan menyebabkan proses input maupun pemanfaatan data tidak berjalan maksimal.

1.3.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas implementasi SIPD di BPKA Aceh menurut teori Edward III dan model DeLone & McLean ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPD di BPKA Aceh terkait aspek teknis, SDM, dan fitur infaq, serta dampaknya pada efektivitas layanan keuangan ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kualitas implementasi SIPD di BPKA Aceh menggunakan teori Edward III dan model DeLone & McLean untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang telah optimal dan yang masih memerlukan perbaikan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPD di BPKA Aceh terkait aspek teknis, SDM, dan fitur infaq, serta dampaknya pada efektivitas layanan keuangan daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teori dengan memperluas pemahaman tentang bagaimana kebijakan digital seperti SIPD dijalankan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, terutama pada wilayah dengan karakteristik khusus seperti Aceh. Dari sisi praktis, temuan penelitian dapat dimanfaatkan BPKA Aceh untuk memperbaiki proses kerja, meningkatkan kemampuan aparatur, serta mengurangi hambatan teknis dan administratif yang muncul akibat keterbatasan sistem. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar evaluasi dan perbaikan dukungan kebijakan agar implementasi SIPD lebih efektif, sekaligus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Studi ini menganalisis implementasi SIPD di BPKA Aceh dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean. Edward III menekankan empat aspek penting keberhasilan implementasi: komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, DeLone dan McLean (1992; 2003) menggunakan enam dimensi untuk menilai keberhasilan sistem informasi: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Integrasi kedua teori ini memungkinkan penelitian tidak hanya menilai sejauh mana kebijakan SIPD dijalankan sesuai regulasi, tetapi juga sejauh mana kualitas sistem dan kepuasan pengguna berkontribusi pada terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.⁸

2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas penggunaan aplikasi SIPD. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti tema-tema yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan integrasi

⁸ Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. (1992). *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable*. Cambridge, MA: MIT Press.

data antarunit. Penelitian ini dilakukan untuk memperjelas posisi dan membedakan fokus kajian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun temuan dari studi-studi sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	JURNAL	PENELITIAN TERDAHULU
1.	<p>Jurnal Isu Sosial Dan Kebijakan</p>	<p>Penulis dan tahun terbit : Laudy Fahzura & Najamudin (2022)</p> <p>Judul penelitian : Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.</p> <p>Kerangka konseptual : Menggunakan model George C. Edward III untuk kebijakan implementasi , penelitian ini menganalisis keberhasilan implementasi melalui empat dimensi utama: komunikasi antara kebijakan pelaksana , ketersediaan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Sejauh mana SIPD dapat mengintegrasikan perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah dapat dievaluasi dengan menggunakan struktur ini.</p> <p>Metode penelitian : Studi ini bersifat kualitatif dan menerapkan metode deskriptif. Kepala Dinas, Sekretaris,</p>

		<p>Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Bendahara, dan Kepala Subbagian Umum adalah lima informan utama dari penelitian ini, yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara menyeluruh, pengamatan penggunaan SIPD, dan penelaahan dokumen DPA 2020 dan 2021.</p> <p>Teknik analisis data : Analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil lapangan dibandingkan dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan pedoman perencanaan anggaran.</p> <p>Hasil penelitian : Studi ini menemukan bahwa meskipun SIPD membantu proses perencanaan dan keterpaduan data, implementasinya belum optimal. Masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan, keterbatasan jaringan internet, kekurangan sarana pendukung, dan perbedaan nomenklatur program, yang membuat entri data menjadi sulit bagi karyawan. Akibatnya, beberapa SKPD masih menggunakan SIMDA Keuangan, aplikasi yang lebih tua.</p>
--	--	---

		<p>Gap Research : Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian Fahzura & Najamudin (2022) fokus pada implementasi SIPD di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, dengan fokus pada integrasi perencanaan data serta tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat dinas. Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Penerapan Aplikasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh” yang menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan regulasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesamaannya adalah sama-sama membahas implementasi SIPD pada instansi pemerintah, namun penelitian ini berbeda karena berfokus pada konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan isu khusus seperti absennya fitur infaq, serta mengabungkan dua teori dari George C. Edward III dan model DeLone & McLean untuk menilai kualitas implementasinya.⁹</p>
--	--	--

⁹ Laudy Fahzura, Najamudin Najamudin.(2022). "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat". *Jurnal Isu Sosial dan Kebijakan*. Vol.7, No.13.

2.	<p>Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik (MAP)</p>	<p>Penulis dan tahun terbit : Sundari, Sri Juni Woro Astuti, & Esa Wahyu Endarti (2023).</p> <p>Judul penelitian : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo.</p> <p>Kerangka konseptual : Di mana SIPD dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan keterpaduan data, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan pembangunan, peneliti menghubungkan penerapan SIPD dengan prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>Metode penelitian : Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penelitian ini fokus pada Bappeda Kabupaten Probolinggo, yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Informasi diperoleh melalui peninjauan proses perencanaan dan wawancara dengan pejabat Bappeda. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan perencanaan daerah juga diperiksa.</p> <p>Teknik analisis data : Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun menjadi pola dan kategori tematik selama proses analisis data untuk menggambarkan</p>
----	--	--

		<p>faktor pendukung, masalah, dan implementasi SIPD.</p> <p>Hasil penelitian : Studi menunjukkan SIPD telah diterapkan secara efektif dan luas di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, terdapat beberapa kendala, termasuk kekurangan SIPD untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan, keterbatasan format laporan yang dapat dicetak, kesalahan dalam akurasi data, dan kurangnya interaksi dengan pengguna. Operator SIPD memiliki sumber daya teknis yang memadai karena mereka telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek).</p> <p>Gap Research : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada ruang lingkup kajian. Studi yang dilakukan oleh Sundari, Astuti, & Endarti (2022) berfokus pada penerapan SIPD di Kabupaten Probolinggo, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan, penggunaan aplikasi pendukung, serta hambatan teknis seperti keterbatasan format laporan, akurasi data, dan minimnya sosialisasi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Penerapan Aplikasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh” yang menilai</p>
--	--	--

		<p>kesesuaian pelaksanaannya dengan regulasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesamaannya adalah sama-sama membahas implementasi SIPD pada instansi pemerintah, namun penelitian ini berbeda karena berfokus pada konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan isu khusus seperti absennya fitur infaq, serta mengabungkan dua teori dari George C. Edward III dan model DeLone & McLean untuk menilai kualitas implementasinya.¹⁰</p>
<p>3.</p>	<p>Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi Sosial, Humaniora, dan Kebijakan Publik</p>	<p>Penulis dan tahun terbit : Indira Septiani & Neneng Weti Isnawaty (2024). Judul penelitian : Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kerangka konseptual : Menggunakan model keberhasilan sistem informasi McLean & DeLone (2003), penelitian ini fokus pada enam dimensi utama: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan bersih.</p>

¹⁰ Sundari Sundari, Sri Juni Woro Astuti, Esa Wahyu Endarti.(2023).“Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo”.*MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*. Vol. 6,No(4), Hal 433-440.

		<p>Metode penelitian : SIPD digunakan secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan; data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Jawa Barat. Metode deskriptif kualitatif juga digunakan.</p> <p>Teknik analisis data : Sugiyono (2022) menyatakan bahwa analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk cerita, dan kesimpulan.</p> <p>Hasil penelitian : Hasilnya menunjukkan bahwa SIPD sangat membantu mengatur data keuangan secara lebih teratur dan meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, masih ada beberapa kendala. Kesalahan input manual, keterbatasan fitur dibandingkan aplikasi sebelumnya (SIPKD), gangguan server, dan ketidakintegrasian sistem adalah beberapa contohnya. Selain itu, pergeseran SIPD RI pada tahun 2025 akan membawa tantangan baru. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur, integrasi fitur, peningkatan kapasitas server, intensifikasi pelatihan, dan dukungan teknis berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas SIPD.</p>
--	--	---

		<p>Research : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian Septiani & Isnawaty (2024) berfokus pada efektivitas SIPD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menilai enam dimensi sistem informasi berdasarkan model McLean & DeLone, serta menyoroti hambatan teknis, keterbatasan fitur, dan kesiapan menghadapi SIPD RI. Sementara itu, Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Penerapan Aplikasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh” yang menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan regulasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesamaannya adalah sama-sama membahas implementasi SIPD pada instansi pemerintah, namun penelitian ini berbeda karena berfokus pada konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan isu khusus seperti absennya fitur infaq, serta menggabungkan dua teori dari George C. Edward III dan model DeLone & McLean untuk menilai kualitas implementasinya..¹¹</p>
--	--	--

¹¹ Indira Septiani, Neneng Weti Isnawaty.(2024). "Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*. Vol.7, No. (4), Hal 193-208.

4.	<p>Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah</p>	<p>Penulis dan tahun terbit : Taufan Alwany (2024).</p> <p>Judul penelitian : Implementasi Pengawasan Pemerintahan pada Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Kerangka konseptual : Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang fokus pada empat komponen: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.</p> <p>Metode penelitian : Melibatkan kepala bidang, kasubbag keuangan, dan staf pelaksana SIPD dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, metode kualitatif menggunakan sampling purposive.</p> <p>Teknik analisis data : Proses reduksi data, penyampaian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan adalah langkah-langkah yang digunakan dalam analisis.</p> <p>Hasil penelitian : Studi menunjukkan bahwa, meskipun konsistensi perlu ditingkatkan, komunikasi dalam penerapan SIPD sudah dilakukan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi. Dalam hal sumber daya, ketersediaan fasilitas dan sumber daya</p>
----	--	---

		<p>manusia cukup memadai, tetapi kualitas dan jumlah pelaksana masih belum seimbang. Pada variabel disposisi, sikap dan motivasi pelaksana masih rendah, dan dukungan insentif belum optimal. Tim pengelola SIPD dibentuk dari struktur birokrasi, namun komitmen pimpinan dan koordinasi antarunit birokrasi masih kurang.</p> <p>Gap penelitian : Penelitian Taufan Alwany (2024) berbeda dari penelitian ini karena penelitian ini lebih fokus pada implementasi pengawasan SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Edward III, yang melihat keberhasilan implementasi sebagai hasil dari komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Penerapan Aplikasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh” yang menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan regulasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesamaannya adalah sama-sama membahas implementasi SIPD pada instansi pemerintah, namun penelitian ini berbeda karena berfokus pada konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan isu khusus</p>
--	--	--

		seperti absennya fitur infaq, serta mengabungkan dua teori dari George C. Edward III dan model DeLone & McLean untuk menilai kualitas implementasinya. ¹²
5.	Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan	<p>Penulis dan tahun terbit : Asep Hendra & Rivaldi Pradana (2023).</p> <p>Judul penelitian : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Anggaran untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat</p> <p>Kerangka konseptual : Dalam konteks pengelolaan anggaran, penelitian ini menggunakan teori implementasi sistem pemerintahan daerah (SIPD) dan fokus pada tiga faktor utama: kualitas sistem informasi, komitmen aparatur, dan bagaimana penggunaan SIPD berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Metode penelitian : Penelitian survei kuantitatif digunakan. Jawaban mereka adalah pejabat pengelola keuangan dan anggaran Kabupaten Bogor . Instrumen terdiri dari kuesioner yang diumumkan kepada sampel yang dipilih yang</p>

¹² Taufan Alwany.(2024). "Implementasi Pengawasan Pemerintah Pada Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol.16, No. (1), Hal 1-14.

		<p>mewakili unit-unit yang berhubungan dengan anggaran pemerintah daerah.</p> <p>Teknik analisis data : Pengaruh variabel bebas, seperti kualitas laporan keuangan, terhadap variabel dependen, diukur dengan menggunakan analisis regresi linier, instrumen validitas dan reliabilitas , dan uji signifikansi variabel.</p> <p>Hasil penelitian : Hasil menunjukkan bahwa penerapan SIPD secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bogor. Kualitas sistem informasi dan komitmen aparatur meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, SIPD belum digunakan secara optimal dalam praktiknya karena beberapa masalah, seperti kurangnya pelatihan staf, masalah teknis pada sistem, dan resistensi terhadap perubahan dalam proses penyusunan.</p> <p>Gap penelitian : Penelitian ini fokusnya pada seberapa jauh kualitas sistem dan komitmen aparatur dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui penggunaan SIPD di Kabupaten Bogor, tetapi belum mengeksplorasi secara mendalam aspek-optimalisasi penggunaan SIPD terkait pengelolaan APBD secara</p>
--	--	--

		<p>menyeluruh, misalnya bagaimana regulasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah di lapangan ikut berperan, serta tidak membandingkan persepsi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) atau evaluasi kesesuaian implementasi dengan regulasi yang berlaku. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Penerapan Aplikasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh” yang menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan regulasi serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kesamaannya adalah sama-sama membahas implementasi SIPD pada instansi pemerintah, namun penelitian ini berbeda karena berfokus pada konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan isu khusus seperti absennya fitur infaq, serta menggabungkan dua teori dari George C. Edward III dan model DeLone & McLean untuk menilai kualitas implementasinya.¹³</p>
--	--	--

¹³ Asep Hendra, Rivaldi Pradana.(2023)."Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat".*Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol.15,No. (1),Hal 122-134.

2.2. Landasan Teori

2.1.1 Definisi Efektivitas Implementasi Kebijakan

Keberhasilan sebuah kebijakan dalam penerapan dan pencapaian sasarannya dikenal sebagai efektivitas penerapan kebijakan. George C. Edwards III menyatakan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah empat komponen utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan seperti aplikasi SIPD sangat bergantung pada bagaimana keempat komponen ini diatur dalam struktur pemerintahan.¹⁴

2.2.2. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi berarti memberikan informasi kebijakan kepada semua pihak yang berkepentingan. Komunikasi yang baik memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami tujuan, keuntungan, dan prosedur penggunaan SIPD. Komunikasi yang buruk dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan.¹⁵

2.2.3 Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Anggaran, infrastruktur TI, perangkat keras dan lunak, dan kemampuan sumber daya manusia adalah semua sumber daya. Aplikasi SIPD dapat dijalankan secara optimal berdasarkan kualitas dan ketersediaan sumber daya ini. Sumber

¹⁴Nanda Dias Ekaputra.(2021)."Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPDI Kabupaten Nganjuk".*Jurnal Otonomi*.Vol. 21,No. (1), Hal 62-79.

¹⁵ Laudy Fahzura, Najamudin Najamudin.(2022)."Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat".*Jurnal Isu Sosial dan Kebijakan*.

daya yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kegagalan dalam operasional dan pemeliharaan sistem.¹⁶

2.2.4 Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi adalah sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana kebijakan. Sikap yang positif dari pegawai akan sangat mempengaruhi tingkat adaptasi dan inisiatif dalam menjalankan kebijakan. Sebaliknya, jika pegawai tidak memahami atau tidak terlibat, penggunaan SIPD cenderung pasif atau bahkan menimbulkan resistensi.¹⁷

2.2.5 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Organisasi, prosedur, sistem koordinasi antarunit kerja, dan mekanisme pengambilan keputusan adalah semua komponen struktur kinerja. Penggunaan SIPD akan lebih lancar dan terarah jika struktur birokrasi diatur dengan baik dan jelas. Sebaliknya, jika struktur birokrasi lemah atau prosedur koordinasi dan keputusan tidak jelas, pelaksanaan SIPD dapat terhambat atau tidak konsisten.¹⁸

2.2.6 Information System Success Model (DeLone & McLean)

Model Tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi dapat diukur dengan menggunakan model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992; 2003). Model ini mencakup enam dimensi utama :

¹⁶ Tsania Nur Alifah Della Ameliya Putri, Titis Purwaningrum.(2025)."Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo".*Journal of Community Dedication*.Vol. 5,Hal 110-118.

¹⁷ Wasiatun hasanah,Adelia,Wulan Ayu Musyrifah,Putri Kamilatul Rohmi.(2025)."Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember".*Padang Jurnal*.Jil.1,No.3

¹⁸ Edward, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

1. **Kualitas Sistem (System Quality)** : adalah pertimbangan tentang elemen teknis seperti kebisingan, keamanan, dan kemudahan penggunaan sistem.
2. **Kualitas Informasi (Information Quality)** : ukuran yang digunakan untuk akurasi, akurasi, dan relevansi informasi yang dihasilkan.
3. **Kualitas Layanan (Service Quality)** : memberikan tingkat dukungan teknis untuk pengguna sistem.
4. **Penggunaan Sistem (Use)** : Istilah ini merujuk pada seberapa banyak dan sering pengguna menggunakan sistem.
5. **Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)** : Ini menunjukkan seberapa puas pengguna atau aparaturnya dengan SIPD.
6. **Manfaat Bersih (Net Benefits)** : mengukur keuntungan yang dihasilkan dari penerapan sistem pada individu dan organisasi.¹⁹

2.4. Kerangka Berpikir

Peneliti menggunakan konsep yang dikenal sebagai "kerangka berpikir" sebagai dasar untuk mendukung fokus penelitian tertentu. Penelitian Kualitatif memerlukan dasar yang mengarahkan penelitian agar menghasilkan hasil yang lebih jelas. Untuk memperjelas konteks dan konsep penelitian yang lebih lanjut, diperlukan kerangka. Penjelasan yang akan diberikan akan menyatukan teori dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian lain yang berkaitan dengan fokus penelitian akan membutuhkan penjelasan tentang kerangka berpikir. Beberapa konsep yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini

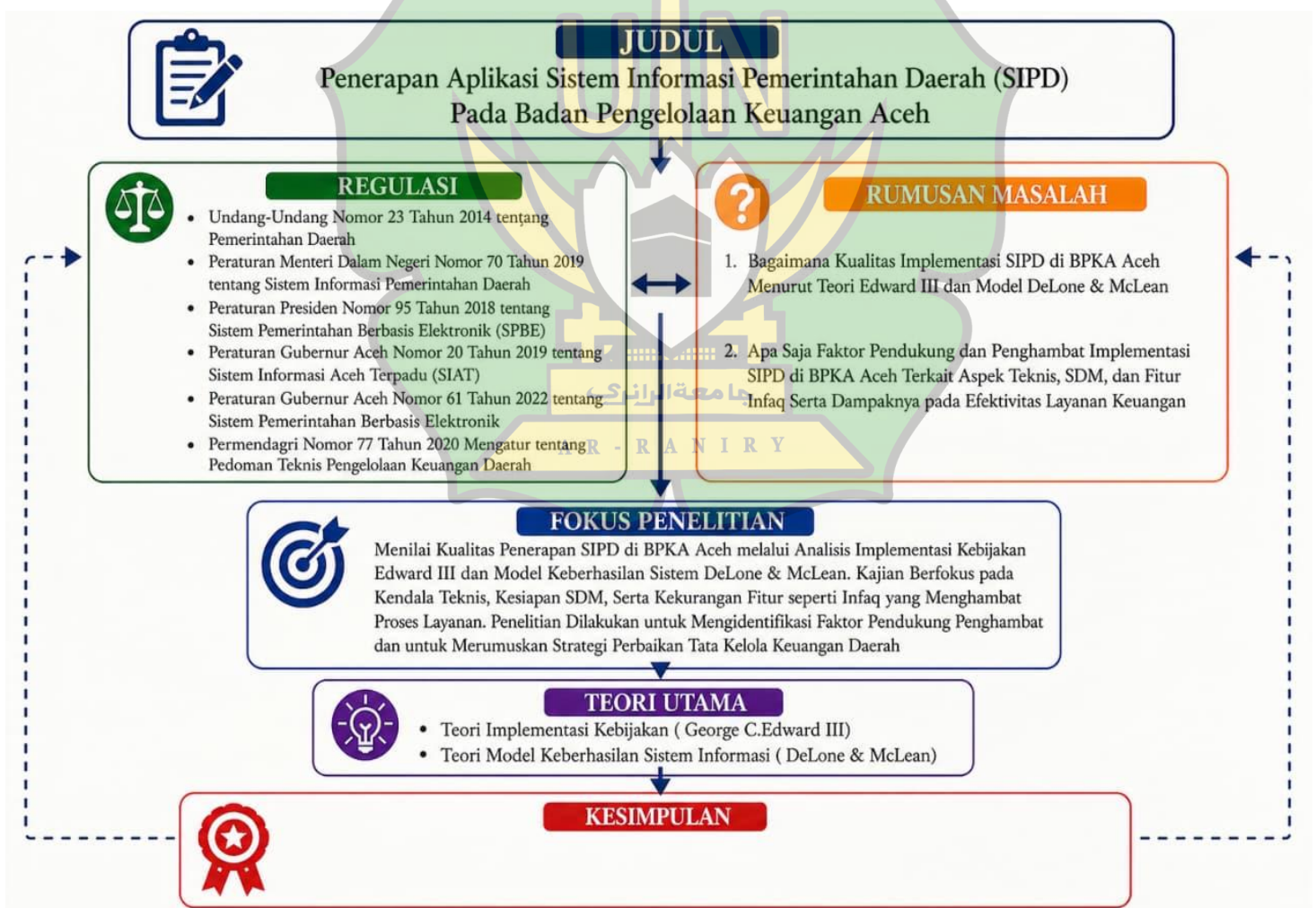
¹⁹ DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. (Monograf / buku; edisi awal).

DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. The DeLone & McLean Model of Information Systems Success: Ten-Year Update. (Buku atau monograf revisi).

dapat digambarkan dari penjelasan ini. Kerangka Berpikir akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti Yaitu “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh”

Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), yang berlokasi di Gedung D Komplek Kantor Gubernur Aceh di Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Peneliti memilih BPKA karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Aceh dan merupakan pengguna utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sebagai subjek penelitian, BPKA memiliki akses langsung ke data administrasi dan sumber daya manusia yang mengelola SIPD, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara mendalam bagaimana SIPD diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh pengalaman subjek penelitian melalui penerapan metode ilmiah dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada konteks khusus yang alami. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang digunakan untuk menelaah fenomena sosial dan permasalahan manusia dalam konteks tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan

Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).²⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyusun gambaran yang komprehensif, menelaah pandangan dan pernyataan responden secara rinci, serta mengamati situasi nyata yang berlangsung di lapangan. Sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana implementasi aplikasi SIPD dilaksanakan pada BPKA serta sejauh mana aplikasi tersebut mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder :

3.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan pegawai terkait di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), seperti Kepala Perbendaharaan, kepala bidang yang menangani perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta staf teknis yang berhubungan langsung dengan pengoperasian aplikasi SIPD. Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap penggunaan SIPD di BPKA untuk melihat secara langsung proses pengoperasian sistem dan kendala yang dihadapi pengguna.

3.3.2 Data Sekunder

²⁰ Dr.Rukin,S.Pd.,M.Si.(2019).”Metodologi Penelitian Kualitatif”. Sulawesi Tengah,Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.

- a) Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan resmi yang tersedia di BPKA maupun instansi terkait, meliputi :
- a. Dokumen Operasional : Laporan kinerja BPKA tahun 2023-2025, Standard Operating Procedures (SOP) penggunaan SIPD, dan laporan insiden gangguan server.
 - b. Data Statistik : Laporan realisasi SPM harian (sebelum dan sesudah implementasi SIPD), jumlah pengguna aktif SIPD, frekuensi error sistem, dan data penggunaan sistem.
 - c. Dokumen Kebijakan : Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pergub Aceh Nomor 20 Tahun 2019, Pergub Aceh Nomor 61 Tahun 2022, dan regulasi terkait lainnya.
 - d. Penelitian Terdahulu : Minimal 10-15 jurnal relevan terkait implementasi SIPD di daerah lain untuk keperluan analisis komparatif dan penguatan kerangka teori.²¹

3.4. Informan Penelitian

Tabel 3.4

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

²¹ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Kriteria
1	Kepala Perbendaharaan	1 Orang	Pemimpin operasional dan pembuat kebijakan terkait SIPD di BPKA
2	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 Orang	Penanggung jawab teknis implementasi SIPD
3	Staf Operator SIPD	2 Orang	Pengguna langsung sistem yang menangani input data dan pemrosesan SPM
4	Staf Unit Terkait (Perencanaan/Bendahara)	1 Orang	Pengguna tidak langsung yang memanfaatkan output SIPD
TOTAL		5 Orang	

Sumber : Olahan Peneliti

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang implementasi SIPD di BPKA Aceh serta terlibat langsung dalam proses penggunaan sistem.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

3.5.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi SIPD, kendala yang dihadapi, serta persepsi pengguna terhadap sistem. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan konteks yang berkembang selama wawancara.

3.5.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengoperasian SIPD di BPKA, termasuk cara pengguna berinteraksi dengan sistem, kendala teknis yang muncul, dan prosedur kerja yang diterapkan. Observasi membantu peneliti memahami konteks nyata implementasi SIPD dan mengidentifikasi gap antara kebijakan dengan praktik di lapangan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait implementasi SIPD, seperti laporan kinerja, SOP, regulasi, dan data statistik penggunaan sistem. Dokumentasi juga mencakup foto atau screenshot sistem untuk mendukung analisis.²²

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut :

²² Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

3.6.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi BPKA dipilah untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi dilakukan guna menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi data agar lebih terstruktur sesuai tujuan penelitian, yaitu menilai efektivitas implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Data yang tidak relevan atau redundan akan dieliminasi untuk memfokuskan analisis pada temuan yang penting.

3.6.2 Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun grafik. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pemahaman pegawai terhadap SIPD, intensitas penggunaannya, serta hambatan yang muncul dalam implementasinya. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diperoleh melalui analisis pola, kecenderungan, dan hubungan antardata, seperti kesesuaian implementasi SIPD dengan kebutuhan pegawai serta dampaknya terhadap transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Untuk menjamin validitas temuan, dilakukan verifikasi dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen kinerja resmi BPKA. Triangulasi sumber data dan metode digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas temuan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Tabel 3. 2
Jadwal Penelitian

Tahap Penelitian	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Studi pendahuluan, penyusunan instrumen, pengurusan izin penelitian di BPKA	1 Februari 2026 (Minggu 1-2)
Pengumpulan Data	Observasi langsung, wawancara mendalam dengan pejabat dan staf BPKA,dokumentasi	Februari-Maret 2026 (Minggu 3-6)
Reduksi dan Kategorisasi Data	Seleksi, penyederhanaan, serta pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen	Maret 2026 (Minggu 7-8)
Analisis dan Interpretasi Data	Menafsirkan pola, hubungan, serta temuan dari data yang telah direduksi	April 2026 (Minggu 9-10)
Penyusunan Laporan	Menyusun hasil penelitian secara sistematis,konsultasi dengan pembimbing,revisi laporan	April-Mei 2026 (Minggu 11-14)
Finalisasi Penelitian	Penyempurnaan laporan akhir dan persiapan sidang munaqasyah	Mei 2026 (Minggu 15-16)

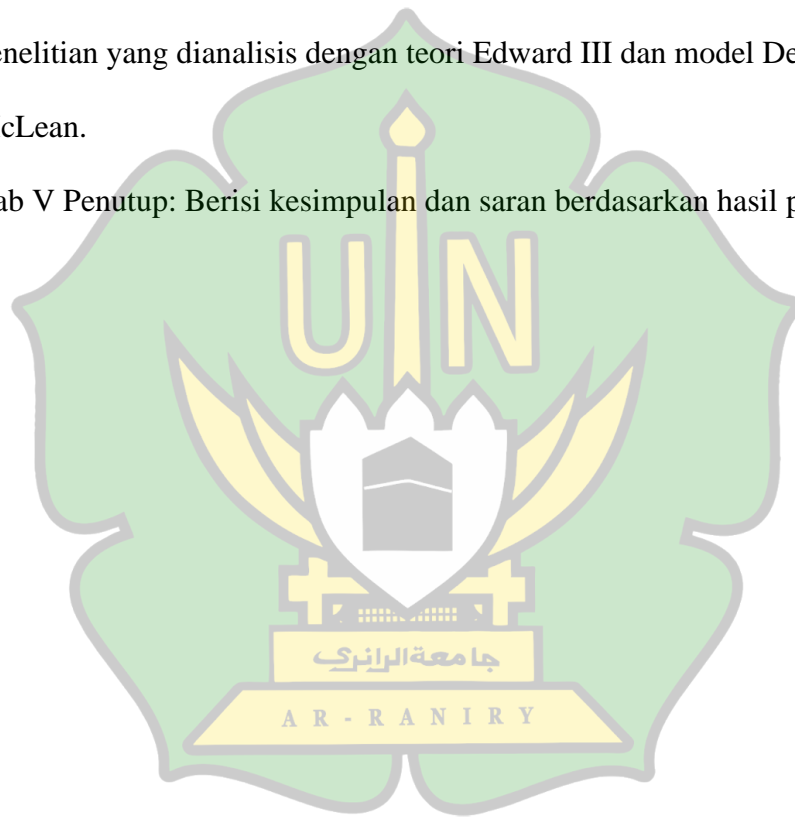
Sumber : Olahan Peneliti

3.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka: Memuat penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir.
3. Bab III Metode Penelitian: Menjelaskan lokasi, jenis, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan jadwal penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Menyajikan hasil temuan penelitian yang dianalisis dengan teori Edward III dan model DeLone & McLean.
5. Bab V Penutup: Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menjalankan kewenangan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan BPKA didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKA berperan strategis dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan, akuntansi, serta pembinaan dan evaluasi anggaran. Selain itu, BPKA juga mengelola barang milik daerah dan menyusun kebijakan teknis keuangan guna memastikan pelaksanaan APBA berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik..²³

4.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) adalah perangkat daerah di tingkat provinsi yang menangani urusan pemerintah di bidang keuangan. BPKA didirikan

²³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Diakses dari situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh: bpka.acehprov.go.id.

atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan dari kedua undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi fungsi pengelolaan keuangan. Selain itu, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 mengatur kedudukan, struktur, dan tugas BPKA, yang dipimpin oleh kepala badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pendapatan daerah, perencanaan dan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset dan pembinaan keuangan pemerintah kabupaten dan kota Aceh adalah semua tanggung jawab fungsional BPKA.

Sejak ditetapkan sebagai perangkat daerah, kepemimpinan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) mengalami beberapa kali pergantian seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi. Pada periode 2017–2022, BPKA dipimpin oleh Bustanul Arifin, SE, M.Si., yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola keuangan daerah serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Selanjutnya, pada masa transisi tahun 2022–2023, jabatan kepala BPKA dijalankan oleh Azhari, ST, M.Si., sebelum kemudian pada tahun 2023 kepemimpinan dilanjutkan oleh Reza Saputra, S.STP., M.Si.. Di bawah kepemimpinan tersebut, BPKA terus berupaya meningkatkan akuntabilitas APBA, memperkuat koordinasi fiskal, serta mendorong penerapan sistem pengelolaan

keuangan berbasis digital agar selaras dengan perkembangan regulasi dan tuntutan pemerintahan yang transparan serta efisien..²⁴

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani

2. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

- Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan
- Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktidak Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain
- Menjaga integritas nasionalis medan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki

²⁴ Pemerintah Aceh. (2016). Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Pemerintah Aceh. (2018). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Profil Birokrasi Pemerintahan Aceh - Badan Pengelolaan keuangan Aceh.
https://bpka.acehprov.go.id/media/2019.02/profil_birokrasi_pemerintah_aceh1.pdf

- Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum; Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi
- Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan
- Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi
- Membangundan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan.
- Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.²⁵

4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 66 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tertera pada Bagian Kedua Paragraf Pertama Pasal 5 yang berbunyi :

²⁵ <https://bpka.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>

“Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pelatihan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.”

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah Aceh. Lembaga ini berperan sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta pengelolaan aset daerah. Secara umum, BPKA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Fungsi tersebut dijalankan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

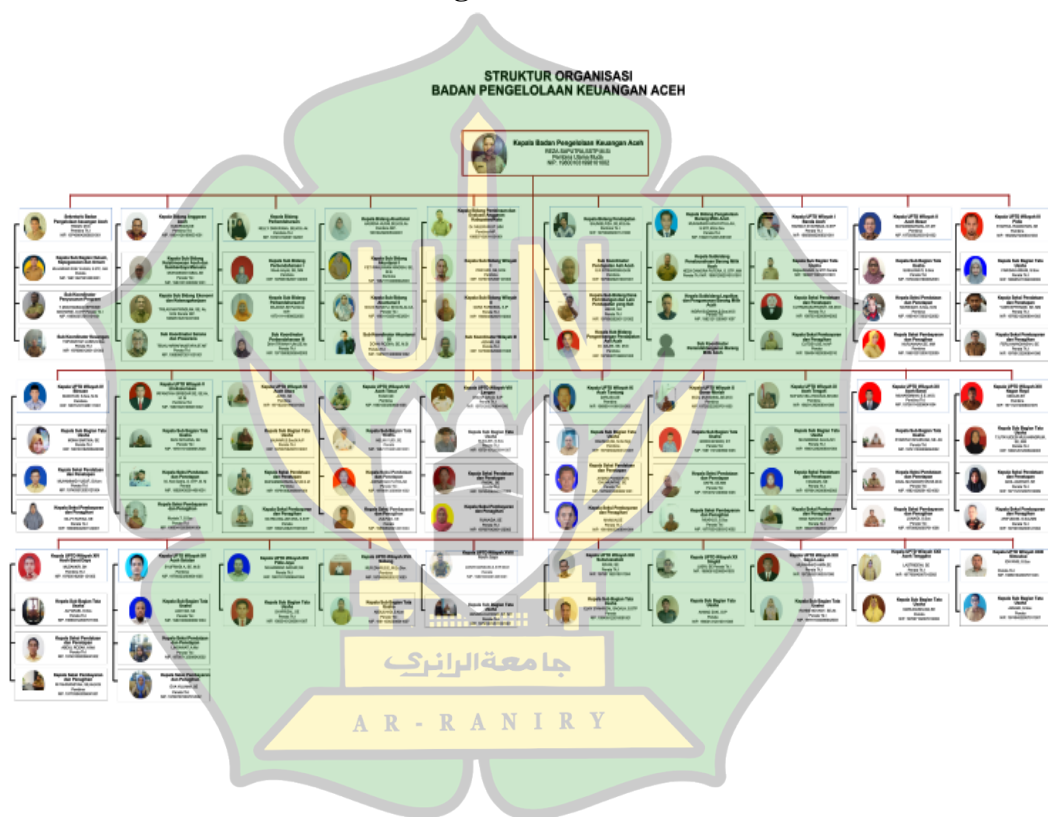
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPKA menyelenggarakan beberapa fungsi utama, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah.
- c. Penyelenggaraan fungsi perbendaharaan daerah.
- d. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah.
- e. Pengelolaan barang milik daerah atau aset pemerintah Aceh.
- f. Pembinaan dan pengawasan teknis pengelolaan keuangan pada perangkat daerah.

- g. Pelaksanaan fungsi administratif dan dukungan teknis lainnya sesuai dengan kewenangan

Melalui fungsi-fungsi tersebut, BPKA berperan penting dalam menjamin pengelolaan APBA berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.²⁶

4.1.4 Susunan Kedudukan dan Fungsi



Gambar 4. 1
Struktur Organisai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
(Sumber : Badan Pengelola Keuangan Aceh)

²⁶ Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tugas dan Fungsi BPKA. Diakses dari <https://bпка.acehprov.go.id/halaman/tugas-fungsi-bпка>.

4.2. Kualitas Implementasi SIPD di BPKA Aceh

Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta model keberhasilan sistem informasi dari DeLone & McLean yang meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan.



Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

4.2.1 Analisis Berdasarkan Teori Edward III

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dengan menggunakan sistem digital yang terintegrasi secara nasional. SIPD menyimpan semua data terkait pengelolaan keuangan daerah dalam sistem yang diusulkan oleh pemerintah pusat . Tujuan dari kondisi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengurangi variasi dalam format data yang ada di setiap daerah. Selain itu, akses ke sistem dibatasi hanya kepada pegawai yang memiliki otoritas yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi mereka. Ini membantu menjaga keamanan dan validitas data.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nani Wahyuni ,S.E.,MM.,Selaku staff operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“pengelolaan aplikasi SIPD dilakukan oleh operator dan validator yang telah ditetapkan secara resmi oleh instansi.penggunaan SIPD merupakan tindak lanjut langsung dari kebijakan pemerintah pusat, di mana seluruh proses perencanaan hingga pelaporan keuangan harus dilakukan melalui sistem tersebut. Sebelumnya, pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan aplikasi berbasis lokal, namun dengan penerapan SIPD, seluruh data keuangan langsung terintegrasi ke dalam sistem pusat sehingga dapat dipantau secara nasional.”²⁷

Beliau Menambahkan :

²⁷ Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni,S.E.,MM.,Selaku Staff Operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

“tidak seluruh pegawai dapat mengakses SIPD. Setiap pengguna terlebih dahulu diberikan akun sesuai dengan peran masing-masing, seperti operator atau validator. Pembatasan akses ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem dan menjaga keamanan data keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan akun dan kewenangan pengguna berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, sehingga instansi daerah tidak dapat memberikan akses secara sembarangan.”²⁸

Temuan wawancara tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi peneliti di lapangan. Selama melakukan pengamatan langsung di kantor BPKA Aceh, terlihat bahwa pengelolaan aplikasi SIPD dijalankan oleh pegawai yang telah ditetapkan secara resmi sebagai operator dan validator. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem SIPD sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat. Penerapan sistem ini menunjukkan bahwa data keuangan daerah yang sebelumnya dikelola melalui aplikasi lokal kini telah terhubung langsung dengan sistem pusat sehingga dapat dipantau secara nasional.

Selain itu, berdasarkan analisis dokumentasi, peneliti menemukan adanya data pengguna serta ketentuan pengelolaan akun dalam sistem SIPD. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pegawai dapat mengakses aplikasi, karena setiap pengguna harus memiliki akun yang diberikan sesuai dengan peran masing-masing, seperti operator atau validator. Pembatasan akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan data keuangan daerah dan mencegah penyalahgunaan sistem. Selain itu, pengaturan akun serta kewenangan pengguna berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, sehingga instansi daerah tidak dapat memberikan akses secara bebas..

²⁸ Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni, S.E., MM., Selaku Staff Operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

a. Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi dianggap sebagai komponen penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi tidak hanya mencakup informasi; hal itu juga memerlukan substansi kebijakan yang jelas, instruksi yang konsisten, dan proses sosialisasi yang efektif kepada pelaksana. Jika kebijakan informasi disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, pelaksana akan lebih mudah memahami tujuan, prosedur, dan tanggung jawab yang diberikan. Komunikasi yang tidak efektif justru dapat menyebabkan perbedaan pemahaman, kesalahan dalam pelaksanaan, dan hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Afriani, S.E., selaku staff bidang perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan:

“Pemerintah pusat telah memberikan informasi resmi tentang kewajiban penggunaan SIPD, dan seluruh pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan ini sebagai bagian dari sistem nasional.”²⁹

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Ibu Nelly Dikkifiana, SEM.Si,Ak,

selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKA Aceh :

“Sosialisasi tentang SIPD sudah disampaikan melalui surat edaran dari Kemendagri. Kami juga menerima panduan teknis, namun memang bimbingan teknis langsung belum pernah dilaksanakan secara formal di sini.”³⁰

Sementara itu, Ibu Sri Hariyati, selaku Staf Unit Perencanaan BPKA Aceh, menambahkan :

²⁹ Wawancara dengan Ibu Afriani, S.E., selaku Staff Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Nelly Dikkifiana, SEM.Si,Ak, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKA Aceh pada tanggal 6 Februari 2026

"Kami sebagai pengguna output SIPD juga merasakan kurangnya sosialisasi. Informasi tentang pembaruan sistem sering kami dapatkan sendiri dari rekan di daerah lain"³¹

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti di lapangan. Selama pengamatan langsung di kantor BPKA Aceh, tidak ditemukan adanya materi sosialisasi resmi berupa poster, brosur, atau panduan cetak terkait pengoperasian SIPD. Beberapa operator tampak mengakses video tutorial dari YouTube sebagai rujukan saat mengalami kendala teknis. Hal ini mengonfirmasi bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat memang belum terlaksana secara memadai di tingkat daerah.

Selain itu, berdasarkan analisis dokumentasi, peneliti tidak menemukan bukti surat undangan atau laporan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) SIPD dari Kemendagri kepada BPKA Aceh selama periode 2022–2025. Dokumen yang tersedia hanya berupa surat edaran kewajiban penggunaan SIPD dan panduan umum dalam format PDF. Ketiadaan dokumen bimtek ini semakin menegaskan bahwa komunikasi teknis dalam implementasi kebijakan SIPD masih bersifat satu arah dan belum disertai pendampingan yang memadai.

b. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh sumber daya, menurut teori implementasi kebijakan Edward III. Sumber daya tidak hanya mencakup jumlah aparatur yang mampu, tetapi juga kompetensi, keterampilan, dan kemampuan teknis pelaksana kebijakan. Di sisi lain, agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik, sarana dan prasarana seperti fasilitas kerja, perangkat

³¹ Wawancara dengan Ibu Sri Hariyati, selaku Staf Unit Perencanaan BPKA Aceh

pendukung, dan dukungan teknis dan operasional harus tersedia. Oleh karena itu, meskipun suatu kebijakan telah ditulis dengan baik, pelaksanaannya di lapangan tidak akan optimal tanpa sumber daya yang mampu untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helia Fitrah, S.T., Selaku staff bidang perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan:

“Secara operasional, penggunaan aplikasi SIPD tidak menunjukkan kendala yang signifikan dari sisi fungsi. Hambatan utama justru muncul pada aspek teknis sistem dan jaringan akibat pengelolaan server yang terpusat secara nasional, sehingga berdampak pada lambatnya akses dan proses pemuatan data. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, kemampuan dan kompetensi aparatur dinilai telah memadai untuk mengoperasikan aplikasi. Oleh karena itu, permasalahan dalam penerapan SIPD lebih berkaitan dengan keterbatasan sistem dan infrastruktur jaringan dibandingkan dengan faktor SDM..”³²

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti di lapangan. Selama melakukan pengamatan langsung di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), peneliti melihat bahwa para operator pada umumnya dapat mengoperasikan aplikasi SIPD tanpa mengalami kesulitan berarti dari sisi penggunaan menu maupun alur kerja aplikasi. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan terlihat proses akses sistem berjalan cukup lambat, terutama ketika membuka menu tertentu atau saat memuat data dalam jumlah besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala yang muncul lebih berkaitan dengan performa sistem dan kestabilan jaringan yang terhubung dengan server pusat, bukan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

³² Wawancara dengan Ibu Helia Fitrah, S.T., Selaku Staff Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis dokumentasi, peneliti menemukan bahwa perangkat kerja yang tersedia di lingkungan BPKA Aceh, seperti komputer operasional dan jaringan internet kantor, secara umum telah digunakan untuk mendukung pengoperasian aplikasi SIPD. Beberapa dokumen internal juga menunjukkan adanya penugasan operator khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan melalui aplikasi tersebut. Namun demikian, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan adanya kendali teknis terhadap pengelolaan server karena sistem tersebut sepenuhnya dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa hambatan yang terjadi dalam penggunaan SIPD lebih berkaitan dengan aspek teknis sistem dan infrastruktur jaringan dibandingkan dengan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi merujuk pada sikap, komitmen, serta kesiapan aparatur dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana memahami dan menerima kebijakan serta memiliki kemauan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Sikap yang positif dan komitmen yang kuat akan mendorong pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan, sedangkan rendahnya kesiapan atau adanya penolakan dapat menjadi faktor penghambat pencapaian hasil kebijakan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nani Wahyuni, S.E., MM., selaku staff operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“Pada dasarnya, apabila sistem sudah ready dan berjalan dengan baik, penerapannya tentu akan didukung sepenuhnya. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem masih dalam tahap pengembangan, sehingga penggunaannya berpotensi menghambat pekerjaan. Beberapa kendala yang dirasakan antara lain proses loading yang lambat serta adanya fitur yang belum berfungsi secara optimal, seperti fitur infaq. Selama sistem dapat memenuhi kebutuhan kerja, pengguna tidak keberatan untuk menggunakannya, tetapi karena sistem belum sepenuhnya mendukung, proses manual dan aplikasi pendamping masih harus digunakan agar pekerjaan tetap berjalan..”³³

Temuan dari hasil wawancara tersebut juga didukung oleh hasil observasi peneliti di lapangan. Berdasarkan pengamatan langsung di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), para operator tetap menggunakan aplikasi SIPD dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Namun, masih terlihat beberapa kendala, seperti proses loading yang cukup lambat serta adanya fitur yang belum berjalan dengan baik, salah satunya fitur infaq. Kondisi ini membuat sebagian pegawai masih menggabungkan penggunaan SIPD dengan cara manual atau menggunakan aplikasi lain agar pekerjaan tetap dapat diselesaikan.

Selain itu, dari hasil analisis dokumentasi, peneliti menemukan bahwa penggunaan SIPD telah ditetapkan sebagai sistem yang wajib diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dokumen yang tersedia umumnya berupa surat edaran dan pedoman penggunaan SIPD. Akan tetapi, dokumen tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi teknis yang terjadi di lapangan, sehingga para

³³ Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni, S.E., MM., selaku Staff operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

pelaksana tetap menggunakan sistem meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaannya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam teori Edward III berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi antarunit, serta prosedur kerja yang mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helia Fitrah, S.T., selaku staff bidang perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“Setiap unsur pelaksana menjalankan peran sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan, melibatkan validator, pengelola KASDA, serta unit terkait lainnya berdasarkan SOP. Koordinasi antarunit terus dilakukan dengan dukungan pejabat struktural agar pengelolaan keuangan berlangsung tertib dan sistematis..”³⁴

Beliau juga menambahkan :

“Meskipun terdapat struktur organisasi yang tersedia, sistem implementasi masih menghadapi hambatan teknis dan administratif yang menghambat kelancaran kerja. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun sistem telah diimplementasikan, koordinasi dan dukungan prosedural masih perlu diperkuat agar implementasi sistem berjalan lebih efisien.”³⁵

Temuan wawancara tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi peneliti di lapangan. Selama melakukan pengamatan langsung di kantor BPKA Aceh, terlihat bahwa setiap unsur pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan pembagian peran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengelolaan keuangan melalui SIPD, terdapat keterlibatan beberapa pihak seperti validator, pengelola KASDA, serta unit terkait lainnya yang bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Koordinasi

³⁴ Wawancara dengan Ibu Helia Fitrah, S.T., selaku Staff Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Helia Fitrah, S.T., selaku Staff Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

antarunit juga terlihat dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural agar proses kerja tetap berjalan tertib dan terarah.

Selain itu, berdasarkan analisis dokumentasi, peneliti menemukan adanya dokumen struktur organisasi serta standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Namun, dokumen tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kendala teknis dan administratif yang masih terjadi dalam praktiknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi dan pembagian tugas telah tersedia, koordinasi serta dukungan prosedural masih perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem dapat berjalan lebih efektif

4.2.2 Analisis Berdasarkan Model DeLone & McLean

a. Kualitas Sistem

Kualitas sistem dapat dipahami sebagai sejauh mana suatu aplikasi mampu berfungsi secara optimal dari sisi teknis. Hal ini terlihat dari kelancaran alur kerja, kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem, serta konsistensi kinerja tanpa sering mengalami gangguan. Sistem yang baik umumnya memiliki antarmuka yang jelas, waktu respons yang relatif cepat, dan tingkat gangguan yang rendah, sehingga membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Afriani, S.E., selaku staff bidang perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

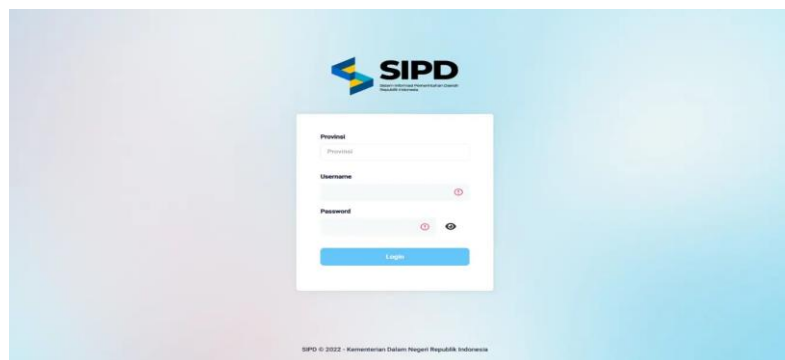
“Sistem nya ini mudah dipahami dan user friendly tapi untuk kelancaran alur kerja kita terkendala di loading nya yang lama dan masih ada fitur-

fitur yang belum memenuhi kebutuhan daerah kita dan ini menghambat pekerjaan saat server sedang down.”³⁶

Hasil wawancara di atas sejalan dengan temuan observasi peneliti. Saat mengamati aktivitas operator SIPD di kantor BPKA, peneliti menyaksikan proses loading halaman yang memakan waktu rata-rata 15–30 detik per halaman, dan pada satu kesempatan server mengalami timeout sehingga operator harus mengulang proses input data dari awal. Beberapa operator juga terlihat membuka aplikasi SIPKD secara bersamaan untuk mengerjakan dokumen yang tidak dapat diproses melalui SIPD, khususnya terkait pengelolaan infaq.

Temuan tersebut juga dikonfirmasi melalui dokumentasi berupa data laporan insiden gangguan server yang dicatat oleh BPKA. Data menunjukkan bahwa gangguan server terjadi dengan frekuensi [sebutkan frekuensi jika ada data], terutama pada jam-jam puncak penggunaan. Screenshot tampilan error dan notifikasi server busy yang berhasil didokumentasikan memperkuat bahwa kendala teknis merupakan faktor utama yang menghambat optimalisasi kualitas sistem SIPD di BPKA Aceh.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Afriani, S.E., Selaku Staff Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.



Gambar 4. 3
Tampilan Login Aplikasi SIPD

(Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aceh)

b. Kualitas Informasi

Kualitas informasi merujuk pada sejauh mana data yang dihasilkan oleh suatu sistem memiliki tingkat ketepatan yang tinggi, disajikan secara utuh, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang akurat, lengkap, dan relevan akan membantu pengguna dalam memahami kondisi yang sebenarnya serta mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nani Wahyuni ,S.E.,MM.,Selaku staff operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“SIPD ini dirancang untuk menyatukan referensi data secara nasional, sehingga tidak terjadi perbedaan format antar daerah. Hal ini bertujuan memudahkan proses monitoring dan evaluasi oleh pemerintah pusat.”³⁷

Beliau juga menambahkan :

“Dengan integrasi data tersebut, sistem diharapkan mampu menghasilkan informasi yang seragam, tapi kendala teknis yang masih muncul dapat menghambat proses input dan validasi sehingga kualitas informasi belum optimal.”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni,S.E.,MM.,Selaku Staff Operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni,S.E.,MM.,Selaku Staff Operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

Hasil wawancara di atas juga sejalan dengan temuan observasi peneliti di lapangan. Selama mengamati penggunaan SIPD di kantor BPKA Aceh, peneliti melihat bahwa sistem memang digunakan sebagai rujukan utama dalam penginputan dan pengelolaan data keuangan. Operator memanfaatkan referensi data yang telah disediakan dalam sistem sehingga format data yang digunakan terlihat seragam. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD dirancang untuk menyatukan standar data secara nasional agar tidak terjadi perbedaan format antar daerah dan memudahkan proses pemantauan oleh pemerintah pusat.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa pedoman penggunaan SIPD dan referensi kodifikasi data yang telah ditetapkan secara nasional. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sistem telah dirancang untuk menghasilkan informasi yang terintegrasi dan seragam. Namun demikian, beberapa kendala teknis yang masih muncul dalam proses penggunaan sistem dapat menghambat proses input dan validasi data, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan melalui sistem belum sepenuhnya optimal.

c. Kualitas Layanan

Kualitas layanan ditunjukkan oleh dukungan teknis dan bantuan yang tersedia untuk membantu pengguna menjalankan sistem. Hal ini mencakup tidak hanya ketersediaan layanan bantuan, tetapi juga kecepatan respon terhadap kendala dan kejelasan solusi yang diberikan. Sehingga aktivitas kerja dapat tetap berjalan tanpa gangguan, pengguna dapat mengatasi masalah teknis dengan dukungan layanan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Cut Mursida

Selaku staff di bidang FRONDESK pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“Saat ini, respons dari pihak pusat terhadap kendala yang dilaporkan masih tergolong lambat, dengan waktu penanganan berkisar antara tiga hingga lima hari. Selain itu, usulan penambahan fitur infaq yang telah disampaikan belum memperoleh tindak lanjut hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan layanan sistem belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, pelatihan teknis belum diselenggarakan secara khusus, sehingga pengguna mempelajari sistem secara mandiri.”³⁹

Hasil wawancara di atas juga sejalan dengan temuan observasi peneliti di lapangan. Saat mengamati aktivitas operator SIPD di kantor BPKA Aceh, peneliti melihat bahwa ketika terjadi kendala pada sistem, operator biasanya melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak pusat dan menunggu tindak lanjut. Namun, proses penanganan yang diterima tidak selalu cepat, sehingga pekerjaan terkadang harus menunggu hingga beberapa hari. Dalam kondisi tertentu, operator juga berusaha mencari solusi sendiri agar pekerjaan tetap dapat diselesaikan.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui dokumentasi yang diperoleh peneliti, seperti bukti laporan kendala sistem serta riwayat komunikasi terkait pengajuan perbaikan atau penambahan fitur dalam SIPD. Dari dokumen tersebut terlihat bahwa beberapa usulan, termasuk permintaan penambahan fitur infaq, belum mendapatkan tindak lanjut hingga saat ini. Selain itu, tidak ditemukan dokumen pelaksanaan pelatihan teknis khusus bagi pengguna SIPD, sehingga sebagian besar operator mempelajari penggunaan sistem secara mandiri. Kondisi

³⁹ Wawancara dengan Ibu Cut Mursida, Selaku Staff di Bidang FRONDESK pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

ini menunjukkan bahwa dukungan layanan sistem masih belum berjalan secara optimal.

d. Pengguna Sistem

Dimensi penggunaan sistem merujuk pada tingkat pemanfaatan aplikasi dalam pelaksanaan tugas rutin pegawai. Penggunaan ini tercermin dari seberapa intens sistem dioperasikan serta sejauh mana sistem tersebut menjadi bagian dari alur kerja sehari-hari dalam mendukung penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helia Fitrah, S.T., Selaku bidang perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“Penggunaan aplikasi SIPD ini didasarkan pada kebijakan nasional yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, pegawai secara rutin mengakses dan memanfaatkan aplikasi tersebut karena seluruh proses kerja telah dialihkan dan bergantung pada sistem ini.”⁴⁰

Hasil wawancara di atas sejalan dengan temuan observasi peneliti di lapangan. Saat mengamati aktivitas operator SIPD di kantor BPKA Aceh, peneliti melihat bahwa para pegawai secara rutin mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Hampir seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan melalui sistem ini, sehingga aktivitas kerja para operator terlihat bergantung pada penggunaan SIPD dalam setiap tahapan pekerjaan.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa surat edaran dan ketentuan resmi mengenai penerapan SIPD di

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Helia Fitrah, S.T., Selaku Staff Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

lingkungan pemerintah daerah. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, para pegawai tetap menggunakan sistem tersebut secara konsisten karena sebagian besar proses kerja telah dialihkan dan terintegrasi ke dalam aplikasi SIPD..

e. Kepuasan Pengguna

Apabila sistem mampu memenuhi kebutuhan kerja pengguna, tingkat kepuasan pengguna diwujudkan dari pengalaman pengguna dalam mengoperasikan sistem, termasuk kemudahan memahami fitur, kelancaran proses kerja, dan kontribusi sistem terhadap efisiensi pekerjaan. Kepuasan pengguna Merujuk pada penilaian subjektif pegawai terhadap seberapa mudah sistem digunakan, memberikan manfaat nyata, dan mendukung kenyamanan dalam melakukan tugas sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Afriani,S.E.,Selaku staff bidang perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“Kita belum sepenuhnya merasa puas terhadap pemanfaatan aplikasi SIPD karena masih sering terjadi gangguan pada server serta belum tersedianya seluruh fitur yang dibutuhkan. Kondisi tersebut mengharuskan beberapa proses kerja diselesaikan secara manual, seperti pengelolaan fitur infaq yang hingga saat ini belum tersedia dalam sistem. Meskipun kendala tersebut telah dilaporkan kepada pihak pusat, belum terdapat tindak lanjut, sehingga pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi SIPD masih mengalami hambatan.”⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Afriani,S.E.,Selaku Staff di Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

Hasil wawancara di atas sejalan dengan temuan observasi peneliti di lapangan. Saat mengamati aktivitas operator SIPD di kantor BPKA Aceh, peneliti melihat bahwa penggunaan sistem masih sering mengalami kendala, terutama ketika server mengalami gangguan. Dalam beberapa kondisi, operator harus menunggu hingga sistem kembali normal sebelum melanjutkan pekerjaan. Selain itu, terdapat beberapa proses yang belum dapat dilakukan melalui SIPD sehingga sebagian pekerjaan masih diselesaikan secara manual, seperti pengelolaan infaq yang belum tersedia dalam sistem.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa catatan laporan kendala sistem serta bukti penyampaian laporan kepada pihak pusat. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa beberapa permasalahan teknis, termasuk gangguan server dan keterbatasan fitur, telah dilaporkan sebelumnya. Namun hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang jelas, sehingga kondisi tersebut masih memengaruhi tingkat kepuasan pengguna dalam memanfaatkan aplikasi SIPD para pegawai merasakan sangat-sangat tidak puas terhadap aplikasi SIPD..

f. **Manfaat Bersih (Net Benefit)**

Manfaat bersih menggambarkan hasil akhir yang diperoleh dari penerapan suatu sistem, baik bagi individu maupun organisasi. Dampak tersebut dapat terlihat pada peningkatan kinerja organisasi, efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan, serta perbaikan kualitas layanan yang diberikan. Apabila sistem digunakan secara optimal, proses kerja menjadi lebih terstruktur, waktu dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, dan output yang dihasilkan menjadi lebih akurat

serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nani Wahyuni ,S.E.,MM.,Selaku staff operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menyampaikan :

“SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh proses digabungkan ke dalam satu platform, yang diharapkan akan mempercepat proses dan memudahkan pengawasan.”⁴²

Beliau juga menambahkan :

“Tapi temuan lapangan, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal karena masih adanya kendala teknis, keterbatasan pelatihan, serta proses adaptasi yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat sistem masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik operasional sehari-hari.”⁴³

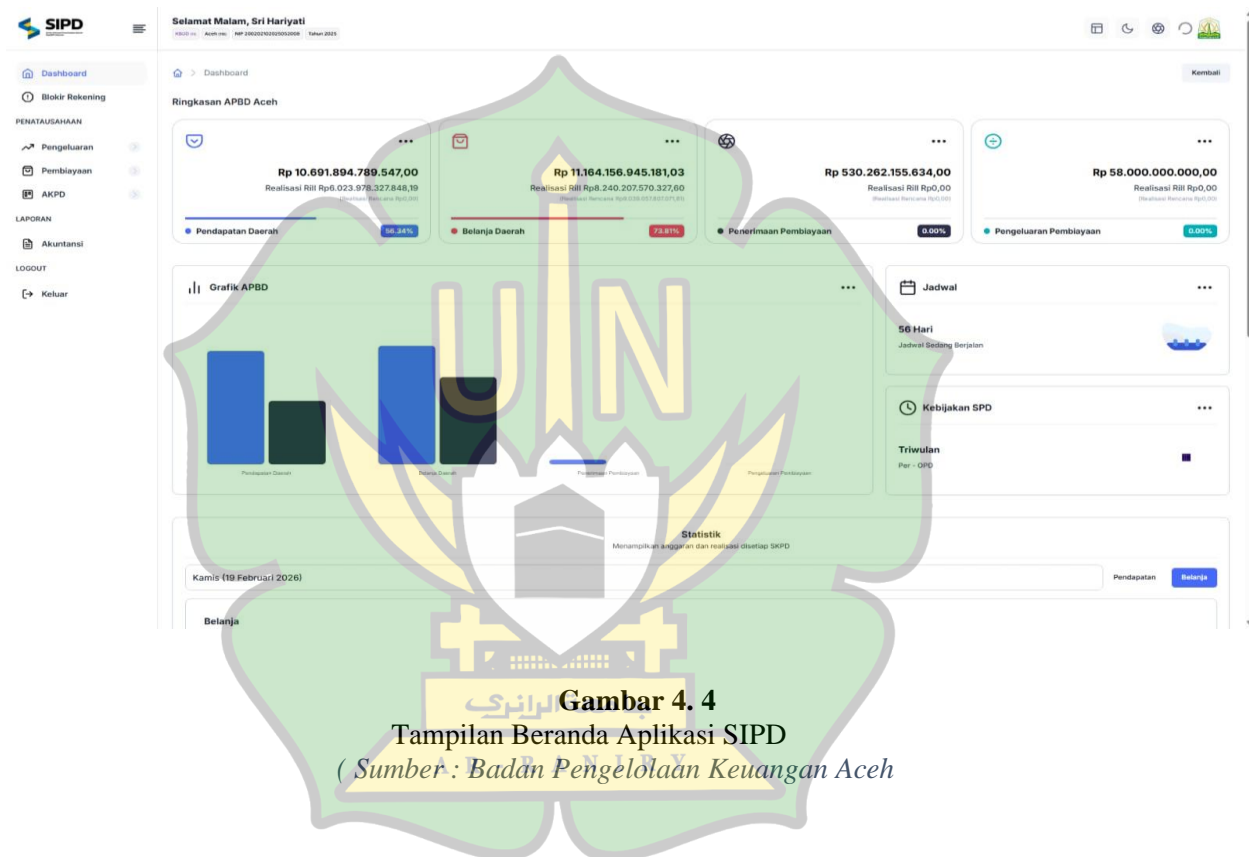
Hasil wawancara di atas sejalan dengan temuan observasi peneliti di lapangan. Saat mengamati penggunaan SIPD di kantor BPKA Aceh, peneliti melihat bahwa sebagian besar proses pengelolaan keuangan telah dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi. Penggunaan platform yang sama dalam berbagai tahapan pekerjaan menunjukkan bahwa sistem ini memang dirancang untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah proses pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa pedoman penggunaan SIPD dan ketentuan implementasinya di pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menggabungkan seluruh proses dalam satu platform. Namun, dari kondisi yang terjadi di lapangan, manfaat tersebut

⁴² Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni,S.E.,MM.,Selaku Staff Operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni,S.E.,MM.,Selaku Staff Operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

belum sepenuhnya dirasakan secara optimal karena masih terdapat kendala teknis, keterbatasan pelatihan, serta proses adaptasi pengguna yang cukup panjang, sehingga manfaat sistem masih lebih bersifat potensial daripada sepenuhnya terealisasi dalam praktik kerja sehari-hari..



4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nelly Dikkifiana,SEM.Si,Ak, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menjelaskan bahwa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam implementasi aplikasi SIPD dalam aspek teknis dan sumber daya manusia adalah :

“Dari aspek teknis. sisi lain atau baik nya kita bilang penggunaan SIPD ini memberi kita kemudahan dalam proses pengelolaan keuangan karena seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan terintegrasi dalam satu sistem.jadi integrasi ini yang menjadi faktor pendukung karena membantu meningkatkan ketertelusuran data serta mempercepat proses administrasi ketika sistem nya sedang normal dan kita tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi seperti sebelumnya.”⁴⁴

Beliau Menambahkan :

“Kalau untuk sumber daya kita sudah memenuhi kebutuhan operasional implementasi SIPD jadi tidak ada kendala untuk Sumber daya dan SDM nya.untuk sekarang ini kecuali pada tahap awal aplikasi ini digunakan,beda lagi nanti konteks nya dan pegawai yang lebih paham IT juga sering membantu yang lain agar semua paham dan cepat beradaptasi dengan sistem baru ini”⁴⁵

Hasil wawancara di atas sejalan dengan temuan observasi peneliti di lapangan. Saat mengamati aktivitas operator SIPD di kantor BPKA Aceh, peneliti melihat bahwa sebagian besar tahapan pengelolaan keuangan telah dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. Integrasi tersebut memudahkan pegawai dalam menelusuri data serta membantu mempercepat proses administrasi ketika sistem berjalan normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyatuan berbagai tahapan kerja dalam satu platform menjadi salah satu faktor yang mendukung penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa pedoman penggunaan sistem serta data terkait pelaksanaan operasional SIPD di BPKA. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa dari sisi

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Nelly Dikkifiana,SEM.Si,Ak, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Nelly Dikkifiana,SEM.Si,Ak, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

sumber daya, baik sarana operasional maupun sumber daya manusia telah dinilai cukup untuk mendukung penerapan sistem. Selain itu, dalam praktik kerja sehari-hari terlihat adanya kerja sama antar pegawai, terutama pegawai yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi yang membantu rekan kerja lainnya agar lebih cepat memahami dan menyesuaikan diri dengan penggunaan sistem baru tersebut..

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nani Wahyuni ,S.E.,MM.,Selaku staff operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang menjelaskan bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam implementasi aplikasi SIPD dalam aspek teknis,SDM dan infaq adalah :

“Dari sisi teknis, permasalahan yang paling terasa adalah gangguan server yang sering menghambat proses validasi SPM, sehingga pencairan anggaran ikut tertunda dan instansi harus membatasi jam penerimaan berkas karena sistem tidak bisa diakses. Selain itu, kendala jaringan serta kemampuan aplikasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kompleksitas struktur APBA membuat proses sinkronisasi data dan pelaporan keuangan berjalan lebih lambat, apalagi ketika volume pekerjaan meningkat dan sistem diakses banyak pegawai secara bersamaan. Dari sisi SDM, pada awal penerapan tidak ada pelatihan khusus, hanya kebijakan nasional untuk langsung beralih ke aplikasi, sehingga pegawai harus belajar sendiri melalui YouTube dan bantuan helpdesk. Di sisi lain, beberapa fitur transaksi, khususnya yang berkaitan dengan infaq, belum bisa diproses langsung di SIPD, sehingga masih harus memakai dua sistem dan pekerjaan manual pun menjadi ganda. Kondisi ini menunjukkan bahwa aplikasi seharusnya lebih disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah, terutama wilayah otonomi khusus seperti Aceh, agar tujuan awal integrasi dalam satu platform benar-benar bisa mempermudah pekerjaan dan menyelaraskan laporan keuangan daerah.”⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Nani Wahyuni,S.E.,MM.,Selaku Staff Operator SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tanggal 6 Februari 2026.

Hasil wawancara di atas sejalan dengan temuan observasi peneliti di lapangan. Saat mengamati aktivitas operator SIPD di kantor BPKA Aceh, peneliti melihat bahwa gangguan server masih sering terjadi dan berdampak langsung pada proses pekerjaan, terutama ketika melakukan validasi SPM. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencairan anggaran menjadi tertunda dan pada waktu tertentu instansi harus membatasi penerimaan berkas karena sistem tidak dapat diakses. Selain itu, ketika volume pekerjaan meningkat dan sistem digunakan secara bersamaan oleh banyak pegawai, proses sinkronisasi data dan pelaporan keuangan juga terlihat berjalan lebih lambat.

Temuan tersebut juga diperkuat melalui dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa catatan kendala sistem serta laporan penggunaan aplikasi SIPD di lingkungan BPKA. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa selain gangguan server dan jaringan, beberapa fitur transaksi dalam sistem juga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kerja, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan infaq sehingga masih harus menggunakan sistem lain dan proses manual. Di sisi lain, pada awal penerapannya tidak terdapat pelatihan teknis khusus, sehingga sebagian pegawai mempelajari penggunaan sistem secara mandiri melalui bantuan rekan kerja, media daring (Youtube), maupun layanan helpdesk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala teknis sistem, keterbatasan pelatihan, serta fitur yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah menjadi faktor yang menghambat optimalnya penggunaan SIPD.

Tabel 4. 1
Ringkasan Status Indikator Implementasi SIPD di BPKA Aceh

No	Teori/Model	Dimensi	Status	Keterangan
1	Edward III	Komunikasi	Terpenuhi Sebagian	Regulasi tersampaikan, bimtek belum ada
2	Edward III	Sumber Daya	Terpenuhi	SDM kompeten, kendala pada infrastruktur TI
3	Edward III	Disposisi	Terpenuhi	Aparatur menerima dan berkomitmen
4	Edward III	Struktur Birokrasi	Terpenuhi	SOP dan pembagian tugas jelas
5	DeLone & McLean	Kualitas Sistem	Terpenuhi Sebagian	User-friendly, tapi server tidak stabil
6	DeLone & McLean	Kualitas Informasi	Terpenuhi Sebagian	Standar nasional ada, input terhambat teknis
7	DeLone & McLean	Kualitas Layanan	Belum Terpenuhi	Respons lambat, pelatihan tidak ada
8	DeLone & McLean	Pengguna Sistem	Terpenuhi	Digunakan rutin sesuai kebijakan
9	DeLone & McLean	Kepuasan Pengguna	Belum Terpenuhi	Gangguan server, fitur kurang
10	DeLone & McLean	Manfaat Bersih	Terpenuhi Sebagian	Potensial ada, belum terealisasi penuh

Sumber : Olahan Peneliti

Saat ini terdapat 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menggunakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangannya (lihat Lampiran 2 untuk daftar lengkap). Seluruh SKPA tersebut wajib mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui SIPD yang divalidasi oleh BPKA selaku Bendahara Umum Daerah.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKA Aceh merupakan bagian dari kebijakan nasional digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu sistem terpusat. Sistem ini menggantikan aplikasi lokal yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah daerah sehingga seluruh data keuangan terhubung langsung dengan pemerintah pusat untuk memperkuat transparansi dan pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD di BPKA Aceh bersifat wajib dan hanya dapat diakses oleh pegawai yang telah ditetapkan sebagai operator dan validator sesuai kewenangan masing-masing. Pembatasan akses tersebut bertujuan menjaga keamanan serta keabsahan data keuangan daerah. Integrasi data secara nasional memperkuat sistem pengawasan keuangan pemerintah pusat terhadap daerah. Meskipun secara administratif SIPD telah diterapkan sesuai prosedur nasional, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas.

Dalam implementasi SIPD untuk peningkatan pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, pelaksanaannya dianalisis berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut teori, George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta dikaji pula melalui Model

Keberhasilan Sistem Informasi dari William H. DeLone dan Ephraim R. McLean yang meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih kinerja sistem.

a. Berdasarkan Indikator Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III

- 1) Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan SIPD dari pemerintah pusat kepada BPKA Aceh baru terlaksana pada tataran formal-regulatif melalui surat edaran dan peraturan tertulis, namun belum diikuti dengan pendampingan teknis yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan teori Edward III (1980) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan tidak cukup hanya berupa penyampaian informasi (transmission), tetapi juga harus mencakup kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency) pesan kepada pelaksana. Absennya bimbingan teknis (bimtek) mengakibatkan aparatur harus mempelajari sistem secara otodidak, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antarpengguna dan memperlambat proses adaptasi. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Najamudin (2022) di Kabupaten Aceh Barat yang juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan pelatihan menjadi hambatan utama implementasi SIPD. Demikian pula, penelitian Alwany (2024) di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan melalui sosialisasi, konsistensi penyampaian masih perlu ditingkatkan. Perbedaan konteks yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa BPKA Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kebutuhan administratif spesifik seperti pengelolaan infaq, sehingga gap komunikasi

tidak hanya berdampak pada pemahaman teknis operasional, tetapi juga pada ketidaktersediaan informasi mengenai rencana pengembangan fitur yang mengakomodasi kekhususan Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi SIPD di BPKA Aceh belum sepenuhnya terpenuhi secara substansial

- 2) Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi SIPD di BPKA Aceh secara umum telah didukung oleh kemampuan aparatur yang cukup memadai dalam mengoperasikan aplikasi, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknis, khususnya pada stabilitas jaringan dan pengelolaan server yang terpusat secara nasional sehingga proses akses dan pemuatan data sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini dapat dianalisis melalui perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia, tetapi juga oleh dukungan fasilitas, infrastruktur, dan sistem operasional yang memadai. Dengan demikian, meskipun kompetensi aparatur relatif mampu mendukung penggunaan sistem, keterbatasan pada aspek teknis dan jaringan tetap berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Laudy Fahzura dan Najamudin (2022) di Kabupaten Aceh Barat yang menemukan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi kendala sumber daya berupa keterbatasan sarana pendukung dan jaringan internet yang mempengaruhi

proses input serta integrasi data antarunit kerja. Hasil yang serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Taufan Alwany (2024) di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya teknis dan dukungan sistem, sehingga keterbatasan infrastruktur dapat menurunkan efektivitas operasional aplikasi di tingkat pelaksana. Perbedaan konteks dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada BPKA Aceh, persoalan sumber daya tidak terletak pada kapasitas aparatur, melainkan lebih pada ketergantungan terhadap sistem server nasional dan kualitas jaringan yang mempengaruhi kelancaran akses aplikasi, sehingga dimensi sumber daya dalam implementasi SIPD belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal dalam mendukung kinerja pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap aparatur dalam penerapan aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada dasarnya menunjukkan kecenderungan menerima dan mendukung penggunaan sistem tersebut sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, meskipun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh kondisi teknis sistem yang belum sepenuhnya stabil. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi pelaksana mencerminkan tingkat komitmen, penerimaan, serta kemauan aparatur dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan; apabila pelaksana memiliki sikap yang positif namun tidak diimbangi dengan kesiapan sistem yang memadai, maka implementasi kebijakan berpotensi berjalan kurang

optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kesiapan aparatur, tetapi juga pada dukungan sistem yang mampu memfasilitasi kebutuhan kerja secara efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asep Hendra dan Rivaldi Pradana (2023) di Kabupaten Bogor yang menunjukkan bahwa komitmen aparatur memiliki peran penting dalam pemanfaatan SIPD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, namun penerapannya masih menghadapi beberapa kendala teknis dan adaptasi penggunaan sistem. Selain itu, penelitian Taufan Alwany (2024) di Provinsi Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi SIPD, di mana sikap penerimaan aparatur terhadap kebijakan digitalisasi pemerintahan turut mempengaruhi keberlangsungan penggunaan sistem dalam praktik administrasi pemerintahan. Dengan demikian, dimensi disposisi dalam implementasi SIPD di BPKA Aceh dapat dikatakan relatif positif dari sisi penerimaan kebijakan, namun efektivitas pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem serta dukungan teknis yang tersedia.

- 4) Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh secara struktural telah mengikuti ketentuan birokrasi yang berlaku melalui pembagian tugas pada unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara struktur kerja yang ada dengan kebutuhan operasional sistem. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan

yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi, terutama melalui kejelasan pembagian kewenangan dan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Ketika struktur organisasi belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan perubahan sistem administrasi digital, maka proses implementasi kebijakan dapat berjalan kurang optimal. Dalam konteks penggunaan SIPD di BPKA Aceh, kondisi ini terlihat dari masih digunakannya dua sistem secara bersamaan, yaitu SIPD dan SIPKD, sehingga alur kerja menjadi lebih panjang dan berpotensi menimbulkan duplikasi proses administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Laudy Fahzura dan Najamudin (2022) di Kabupaten Aceh Barat yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya berjalan optimal karena adanya kendala dalam penyesuaian mekanisme kerja birokrasi serta penggunaan sistem lama yang masih dipertahankan oleh sebagian instansi. Selain itu, penelitian Taufan Alwany (2024) di Provinsi Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung implementasi SIPD, khususnya dalam memastikan adanya koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan sistem informasi pemerintahan daerah. Dengan demikian, dimensi struktur birokrasi dalam penerapan SIPD di BPKA Aceh pada dasarnya telah terbentuk secara formal, namun masih memerlukan penyesuaian prosedur kerja dan integrasi sistem agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

b. Berdasarkan Indikator Model Keberhasilan Sistem Informasi dari William H. DeLone Ephraim R. McLean

1) Berdasarkan temuan penelitian, kualitas sistem SIPD di BPKA Aceh menunjukkan dualitas: dari aspek antarmuka (interface), sistem dinilai mudah dipahami dan user-friendly, namun dari aspek performa teknis, sistem menghadapi kendala signifikan berupa lambatnya proses loading dan ketidakstabilan server. Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas sistem mencakup aspek kemudahan penggunaan (ease of use), keandalan (reliability), dan fleksibilitas (flexibility). Dari ketiga aspek tersebut, hanya kemudahan penggunaan yang telah terpenuhi dengan baik. Permasalahan keandalan server yang terpusat secara nasional menunjukkan adanya kelemahan arsitektural dalam desain sistem. Berbeda dengan penelitian Septiani dan Isnawaty (2024) di Jawa Barat yang menemukan kendala serupa namun dalam skala lebih ringan, permasalahan di BPKA Aceh diperparah oleh kondisi geografis dan infrastruktur jaringan di wilayah Aceh yang relatif lebih terbatas dibandingkan Pulau Jawa. Selain itu, ketiadaan fitur infaq yang menjadi kebutuhan spesifik daerah menunjukkan bahwa fleksibilitas sistem masih rendah dalam mengakomodasi kekhasan regulasi daerah otonomi khusus. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah pusat perlu mempertimbangkan model server terdistribusi (distributed server) atau penguatan kapasitas bandwidth untuk daerah dengan infrastruktur terbatas, serta menyediakan modul tambahan yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan administratif daerah.

2) Berdasarkan temuan penelitian, kualitas informasi yang dihasilkan melalui aplikasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menunjukkan bahwa sistem telah mampu menyediakan informasi keuangan yang terintegrasi sehingga memudahkan proses pengelolaan data perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dalam satu sistem yang sama. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pada aspek kelengkapan informasi yang dibutuhkan oleh daerah, terutama terkait kebutuhan administratif tertentu yang belum sepenuhnya terakomodasi di dalam sistem. Menurut model keberhasilan sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003), kualitas informasi dalam suatu sistem informasi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti akurasi, kelengkapan, serta relevansi informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dalam konteks penerapan SIPD di BPKA Aceh, aspek akurasi informasi relatif telah terpenuhi karena sistem dirancang untuk menyeragamkan proses pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Akan tetapi, dari sisi kelengkapan informasi masih terdapat keterbatasan karena beberapa kebutuhan administratif daerah belum sepenuhnya terakomodasi dalam fitur sistem yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun informasi yang dihasilkan oleh SIPD telah mendukung integrasi data keuangan daerah, fleksibilitas sistem dalam menyesuaikan kebutuhan informasi pada masing-masing instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indira Septiani dan Neneng Weti Isnawaty (2024) di Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD mampu

meningkatkan transparansi serta keterpaduan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun kualitas informasi yang dihasilkan tetap dipengaruhi oleh kesesuaian fitur sistem dengan kebutuhan administrasi pada setiap instansi pemerintah. Oleh karena itu, kualitas informasi dalam implementasi SIPD di BPKA Aceh dapat dikatakan telah mendukung integrasi pengelolaan data keuangan daerah, tetapi masih memerlukan pengembangan sistem agar informasi yang dihasilkan dapat lebih lengkap dan relevan dengan kebutuhan pengelolaan administrasi daerah.

- 3) Berdasarkan temuan penelitian, kualitas layanan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh masih menghadapi beberapa kendala terutama pada aspek dukungan teknis dari pengelola sistem. Layanan bantuan yang tersedia belum mampu merespons permasalahan pengguna secara cepat sehingga penyelesaian kendala teknis sering membutuhkan waktu beberapa hari. Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas layanan dalam sistem informasi mencakup dimensi responsivitas, jaminan bantuan teknis, serta kemampuan penyedia sistem dalam memberikan dukungan yang efektif kepada pengguna. Dari ketiga aspek tersebut, responsivitas layanan masih menjadi kelemahan utama karena lambatnya penanganan laporan gangguan menyebabkan sebagian proses kerja harus diselesaikan secara manual dan berpotensi menghambat alur administrasi keuangan. Berbeda dengan penelitian Laudy Fahzura dan Najamudin (2022) di Kabupaten Aceh Barat yang menemukan kendala layanan teknis berupa keterbatasan pelatihan dan sosialisasi sistem, permasalahan di BPKA Aceh lebih berkaitan dengan

lambatnya respons bantuan teknis dari pengelola sistem yang terpusat secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan SIPD masih perlu diperkuat melalui peningkatan kecepatan respons layanan bantuan serta mekanisme pendampingan teknis yang lebih efektif bagi pengguna di daerah.

- 4) Berdasarkan temuan penelitian, pengguna sistem SIPD di BPKA Aceh menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi, namun belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi kerja aparatur. Sistem digunakan secara rutin dalam proses pengelolaan keuangan daerah karena penerapannya bersifat wajib, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan kendala operasional seperti gangguan server, proses sinkronisasi yang lambat, serta penggunaan dua aplikasi secara paralel akibat belum tersedianya fitur pengelolaan infaq dalam SIPD. Menurut DeLone dan McLean (2003), dimensi penggunaan sistem (use) tidak hanya dilihat dari frekuensi pemakaian, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu mendukung pekerjaan pengguna secara efektif. Dalam konteks ini, tingkat penggunaan SIPD di BPKA Aceh memang tinggi, namun belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas karena masih dipengaruhi faktor kewajiban kebijakan dan keterbatasan fitur sistem. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan penelitian Asep Hendra dan Rivaldi Pradana (2023) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menemukan bahwa SIPD membantu proses penyusunan anggaran dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, tetapi masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan sistem yang mempengaruhi kenyamanan pengguna dalam

bekerja. Perbedaannya, pada BPKA Aceh permasalahan penggunaan sistem menjadi lebih kompleks karena adanya kebutuhan administratif daerah otonomi khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain SIPD secara nasional.

- 5) Berdasarkan temuan penelitian, kepuasan pengguna terhadap sistem SIPD di BPKA Aceh menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya optimal. Dari sisi manfaat, sistem ini telah membantu aparatur dalam mengelola administrasi keuangan secara lebih terstruktur karena seluruh proses pencatatan dan pelaporan terintegrasi dalam satu platform. Namun dalam praktiknya, kepuasan pengguna masih dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis seperti gangguan server yang berulang, keterlambatan sinkronisasi data, serta penggunaan dua aplikasi secara bersamaan akibat belum tersedianya fitur pengelolaan infaq dalam SIPD. Menurut DeLone dan McLean (2003), kepuasan pengguna merupakan indikator penting keberhasilan sistem informasi yang dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang mampu mendukung pekerjaan pengguna secara efektif. Dalam konteks ini, kepuasan pengguna di BPKA Aceh belum sepenuhnya tercapai karena stabilitas sistem dan kelengkapan fitur masih menjadi hambatan dalam penggunaan sehari-hari. Kondisi ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sundari, Astuti, dan Endarti (2023) di Kabupaten Probolinggo yang menunjukkan bahwa SIPD membantu pengelolaan administrasi keuangan daerah, tetapi kepuasan pengguna masih dipengaruhi oleh keterbatasan fitur, kendala teknis, serta akurasi data yang

belum sepenuhnya stabil. Perbedaannya, pada BPKA Aceh tingkat kepuasan pengguna cenderung lebih rendah karena adanya kebutuhan administratif daerah otonomi khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem SIPD secara nasional.

- 6) Berdasarkan temuan penelitian, manfaat bersih (net benefit) dari penerapan SIPD di BPKA Aceh menunjukkan adanya dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan keteraturan administrasi pengelolaan keuangan daerah, namun efektivitas manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kendala teknis sistem dan proses adaptasi pengguna. Menurut DeLone dan McLean (2003), manfaat bersih merupakan hasil akhir dari keberhasilan sistem informasi yang tercermin melalui peningkatan kinerja organisasi, efisiensi kerja, serta kualitas pengambilan keputusan. Dari aspek tersebut, SIPD telah mendukung integrasi data pengelolaan keuangan secara nasional dan mempermudah proses pengawasan administrasi, tetapi peningkatan efisiensi kerja aparatur belum sepenuhnya tercapai karena gangguan sistem dan keterbatasan dukungan teknis masih terjadi dalam proses operasional. Berbeda dengan penelitian Laudy Fahzura dan Najamudin (2022) di Kabupaten Aceh Barat yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD memberikan manfaat yang lebih stabil dalam integrasi administrasi pemerintahan, kondisi di BPKA Aceh masih menghadapi tantangan pada aspek teknis yang mempengaruhi optimalisasi manfaat sistem bagi kinerja organisasi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan stabilitas sistem serta penguatan

kapasitas pengguna menjadi faktor penting agar manfaat bersih dari penerapan SIPD dapat dirasakan secara lebih maksimal dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- c. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi SIPD.

- 1) Faktor Pendukung

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga didukung oleh kesiapan sumber daya manusia serta adanya pembagian peran yang jelas dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang berperan sebagai operator dan validator umumnya telah mampu mengoperasikan sistem sesuai dengan alur kerja yang ditetapkan, sehingga proses penginputan dan pengelolaan data keuangan tetap dapat berjalan meskipun sistem masih menghadapi beberapa kendala teknis. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya dan struktur birokrasi telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan, karena pelaksana memiliki kompetensi serta tanggung jawab yang terdistribusi secara jelas dalam prosedur kerja. Di sisi lain, dari sudut pandang model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean (2003), kemampuan pengguna dalam menjalankan aplikasi serta keberlangsungan penggunaan sistem secara rutin mencerminkan bahwa dimensi penggunaan sistem (use) telah berjalan cukup baik. Dukungan regulasi nasional yang mewajibkan penggunaan SIPD juga memperkuat komitmen organisasi dalam menerapkan sistem tersebut sebagai bagian dari tata kelola keuangan daerah yang terintegrasi,

sehingga meskipun terdapat keterbatasan teknis, proses administrasi keuangan tetap dapat dijalankan secara sistematis dalam lingkungan birokrasi BPKA Aceh.

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan temuan peneliti, faktor penghambat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berkaitan dengan kendala teknis sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta keterbatasan fitur yang belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan daerah. Gangguan server yang masih sering terjadi serta kualitas jaringan yang tidak stabil menyebabkan proses validasi SPM, sinkronisasi data, dan pelaporan keuangan berjalan lebih lambat, bahkan pada waktu tertentu instansi harus membatasi penerimaan berkas karena sistem tidak dapat diakses secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keandalan sistem belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam model keberhasilan sistem informasi William H. DeLone dan Ephraim R. McLean (2003), yang menekankan pentingnya reliability dan stabilitas sistem dalam mendukung kinerja organisasi. Di sisi lain, pada tahap awal penerapan tidak tersedia pelatihan teknis formal sehingga sebagian aparatur mempelajari penggunaan sistem secara mandiri melalui media daring (Yutobe) dan bantuan helpdesk, yang berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat pemahaman antarpegawai. Hambatan lain terlihat dari belum tersedianya fitur pengelolaan infaq di dalam SIPD, sehingga pegawai masih harus menggunakan dua sistem secara bersamaan dan melakukan proses manual tambahan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa meskipun sistem telah diterapkan secara nasional, desain aplikasi belum sepenuhnya fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan administratif daerah

otonomi khusus seperti Aceh, sehingga efisiensi kerja dan pelayanan keuangan daerah belum tercapai secara maksimal.

- d. Dampak implementasi layanan SIPD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi layanan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menunjukkan bahwa sistem ini telah memberikan kontribusi terhadap keteraturan administrasi serta integrasi pengelolaan keuangan daerah, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Secara konseptual, digitalisasi pengelolaan keuangan melalui SIPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala yang memengaruhi kinerja layanan keuangan. Gangguan server yang terjadi secara berulang serta kualitas jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan proses input dan sinkronisasi data sering mengalami keterlambatan, sehingga berdampak pada lambatnya penyelesaian administrasi dan tertundanya beberapa proses layanan keuangan. Selain itu, keterbatasan fitur sistem seperti tidak tersedianya pengelolaan infaq mengharuskan aparatur menggunakan sistem tambahan di luar SIPD, yang pada akhirnya meningkatkan beban kerja dan menurunkan efisiensi operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi terpusat belum secara otomatis meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah apabila tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur teknis, kelengkapan fitur sesuai kebutuhan daerah, serta dukungan teknis yang memadai dalam operasional sistem.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas implementasi SIPD di BPKA Aceh menurut teori Edward III dan model DeLone & McLean

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III :

- a. Komunikasi : Kebijakan penggunaan SIPD telah disampaikan secara formal melalui regulasi nasional, namun sosialisasi dan bimbingan teknis belum terlaksana secara memadai, sehingga aparatur harus mempelajari sistem secara otodidak.
- b. Sumber Daya : Kompetensi SDM aparatur telah memadai untuk mengoperasikan SIPD. Hambatan utama berasal dari keterbatasan infrastruktur teknis, khususnya ketidakstabilan server dan jaringan yang dikelola terpusat secara nasional.
- c. Disposisi : Aparatur BPKA Aceh menunjukkan sikap menerima dan berkomitmen terhadap kebijakan SIPD. Tidak ditemukan adanya resistensi terhadap penggunaan sistem; kendala yang muncul bersumber dari aspek teknis, bukan sikap pelaksana.

- d. Struktur Birokrasi : Pembagian tugas, pelibatan unit terkait, dan koordinasi telah berjalan sesuai SOP dengan dukungan pejabat struktural, meskipun efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan model DeLone & McLean:

- a) Kualitas Sistem : Antarmuka SIPD dinilai user-friendly dan mudah dipahami, namun performa terhambat oleh lambatnya loading dan ketidakstabilan server serta ketiadaan fitur infaq.
- b) Kualitas Informasi : Data yang dihasilkan SIPD telah terstandarisasi secara nasional, namun kendala teknis menyebabkan proses input dan validasi belum berjalan optimal.
- c) Kualitas Layanan : Dukungan teknis dari pusat masih lambat (3–5 hari per laporan kendala), pelatihan formal belum tersedia, dan usulan fitur infaq belum ditindaklanjuti.
- d) Penggunaan Sistem : Penggunaan SIPD telah berjalan secara rutin karena seluruh proses kerja terintegrasi ke dalam sistem sesuai kebijakan nasional.
- e) Kepuasan Pengguna : Pengguna belum sepenuhnya puas akibat gangguan server, keterbatasan fitur, dan keharusan menyelesaikan sebagian proses secara manual.
- f) Manfaat Bersih : SIPD bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, namun manfaat tersebut masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya terealisasi dalam operasional sehari-hari.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPD di BPKA Aceh serta dampaknya terhadap efektivitas layanan keuangan

Faktor Pendukung :

- a. Regulasi nasional yang mewajibkan penggunaan SIPD (Permendagri No. 70/2019 dan No. 77/2020)
- b. Komitmen pemerintah daerah Aceh dalam menerapkan sistem digital
- c. Kompetensi dan kesiapan SDM aparatur pengelola keuangan
- d. Sistem yang dirancang terintegrasi secara nasional untuk mendukung monitoring dan evaluasi

Faktor Penghambat :

- a. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan ketidakstabilan server terpusat
- b. Belum tersedianya fitur khusus daerah seperti pengelolaan infaq
- c. Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat
- d. Lambatnya respons dukungan teknis dari pengelola sistem di tingkat pusat

Dampak terhadap Efektivitas Layanan :

Kendala-kendala tersebut menyebabkan BPKA Aceh harus menggunakan dua aplikasi secara bersamaan (SIPD dan SIPKD), menimbulkan duplikasi proses administrasi, pembatasan jam pengantaran SPM dari pukul 08.00–17.00 menjadi 08.00–15.00, serta penurunan kapasitas pemrosesan SPM harian. Meskipun SIPD telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, efisiensi layanan belum tercapai secara optimal.

1.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

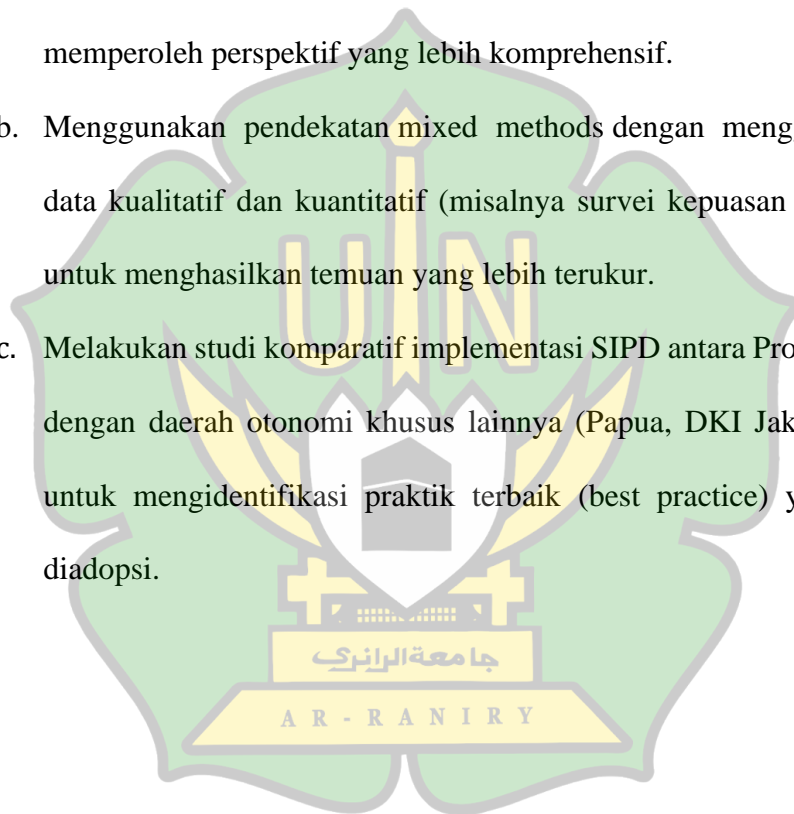
1. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri)

- a. Meningkatkan stabilitas dan kapasitas server SIPD melalui penerapan sistem server terdistribusi (distributed server) atau penyediaan server cadangan regional untuk mengurangi ketergantungan pada server tunggal nasional.
 - b. Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala dan terstruktur bagi seluruh pemerintah daerah, tidak hanya berupa sosialisasi regulasi tetapi juga pelatihan pengoperasian sistem secara langsung.
 - c. Menyediakan fitur yang mengakomodasi kekhasan administratif daerah otonomi khusus, seperti modul pengelolaan infaq untuk Provinsi Aceh, agar seluruh proses keuangan dapat dikelola dalam satu sistem tanpa memerlukan aplikasi pendamping.
 - d. Mempercepat waktu respons layanan dukungan teknis (helpdesk) dari 3–5 hari menjadi maksimal 1×24 jam untuk kendala operasional kritis.
2. Bagi BPKA Aceh
- a. Mengusulkan penambahan bandwidth dan infrastruktur jaringan di lingkungan kantor BPKA untuk mendukung kelancaran akses sistem.
 - b. Menginisiasi pelatihan internal secara mandiri bagi seluruh operator dan validator SIPD untuk menyamakan pemahaman dan keterampilan teknis pengoperasian sistem.
 - c. Mendokumentasikan secara sistematis seluruh kendala teknis yang terjadi sebagai bahan evaluasi dan komunikasi dengan pengelola sistem di tingkat pusat.

- d. Menyusun SOP transisi penggunaan sistem ganda (SIPD dan SIPKD) agar duplikasi proses dapat diminimalkan selama fitur infaq belum tersedia di SIPD.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian dengan cakupan informan yang lebih luas, termasuk perwakilan dari SKPA pengguna output SIPD, untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.
- b. Menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif (misalnya survei kepuasan pengguna) untuk menghasilkan temuan yang lebih terukur.
- c. Melakukan studi komparatif implementasi SIPD antara Provinsi Aceh dengan daerah otonomi khusus lainnya (Papua, DKI Jakarta, DIY) untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practice) yang dapat diadopsi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. (1992). *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable*. Cambridge, MA: MIT Press.

DeLone, William H., & McLean, Ephraim R. (2003). *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. Cambridge, MA: MIT Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

2. E-Book

Dr.Rukin,S.Pd.,M.Si.(2019).”Metodologi Penelitian Kualitatif”. Sulawesi Tengah,Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.

3. Artikel Jurnal Online

Sundari Sundari, Sri Juni Woro Astuti, Esa Wahyu Endarti.(2023).”Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo”.*MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*.Vol. 6,No(4), Hal 433-440.

Asep Hendra, Rivaldi Pradana.(2023).”Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”.*Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*.Vol.15,No. (1),Hal 122-134.

Indira Septiani, Neneng Weti Isnawaty.(2024).”Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat”.*Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*.Vol.7, No.(4),Hal 193-208.

Maulizar Alfian,Lilis Marlina.(2022).”Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Setdakab Aceh Barat”.*Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* .Vol.4,No. (6),Hal 416-423.

Taufan Alwany.(2024)."Implementasi Pengawasan Pemerintah Pada Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan".*Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*.Vol.16,No. (1),Hal 1-14.

Laudy Fahzura, Najamudin Najamudin.(2022)."Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat".*Jurnal Isu Sosial dan Kebijakan*.Vol.7,No.13.

Nanda Dias Ekaputra.(2021)."Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk".*Jurnal Otonomi*.Vol. 21,No. (1), Hal 62-79.

Tsania Nur Alifah Della Ameliya Putri, Titis Purwaningrum.(2025)."Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo".*Journal of Community Dedication*.Vol. 5,Hal 110-118.

Wasiatun hasanah,Adelia,Wulan Ayu Musyrifah,Putri Kamilatul Rohmi.(2025)."Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember".*Padang Jurnal*.Jil.1,No.3.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Mengatur Tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh. (2016). Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Pemerintah Aceh. (2018). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5. Artikel/Website Resmi Pemerintah :

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Diakses dari situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh : bpka.acehprov.go.id.

Profil Birokrasi Pemerintahan Aceh Badan Pengelolaan keuangan Aceh. bpka.acehprov.go.id.

Profil Badan Pengelolaan Keuangan Aceh : https://bpka.acehprov.go.id/media/2019.02/profil_birokrasi_pemerintah_aceh1.pdf.

Visi Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh : <https://bpka.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tugas dan Fungsi BPKA. Diakses dari <https://bpka.acehprov.go.id/halaman/tugas-fungsi-bpka>.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

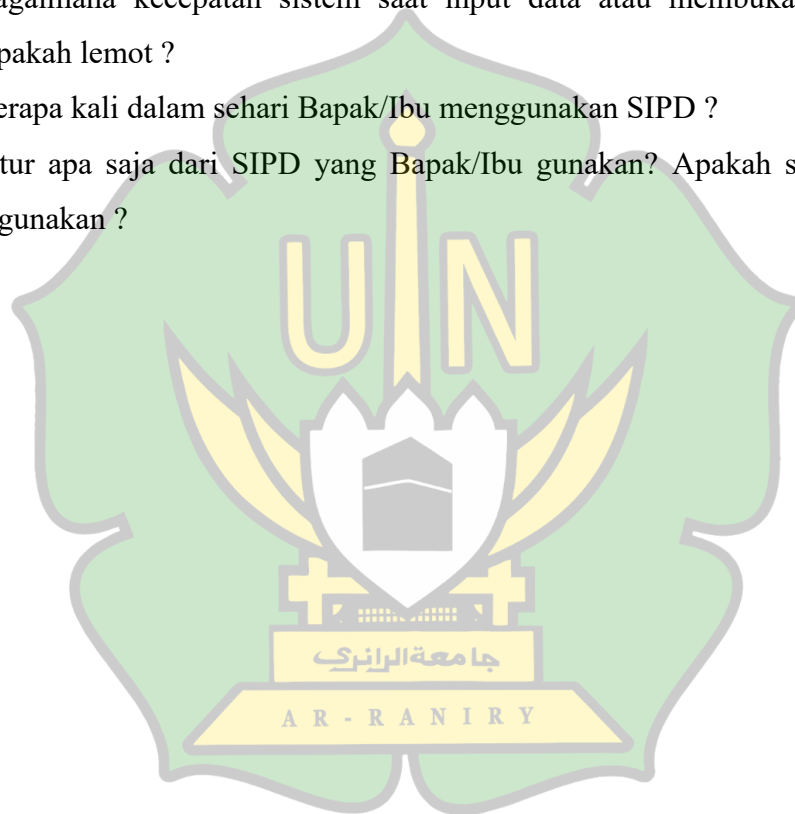
1. Bagaimana proses sosialisasi SIPD di BPKA? Apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami ?
2. Berapa jumlah pegawai yang mengelola SIPD? Apakah sudah mencukupi ?
3. Apakah anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan SIPD memadai ?
4. Apakah terdapat SOP yang jelas untuk penggunaan SIPD di BPKA ?
5. Apakah SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ?
6. Apakah SIPD mempercepat proses kerja dibanding sistem sebelumnya (SIPKD) ?

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Bidang Perbendaharaan

1. Apakah informasi tentang penggunaan SIPD konsisten dari berbagai sumber (pusat, provinsi, internal) ?
2. Berapa kali pelatihan SIPD diadakan? Apakah materi pelatihan memadai ?
3. Bagaimana tingkat kemampuan teknis operator SIPD? Apakah ada pegawai yang kesulitan ?
4. Bagaimana kondisi server, jaringan, dan perangkat komputer untuk SIPD ?
5. Apakah data yang dihasilkan SIPD akurat? Apakah pernah ada kesalahan data ?
6. Jika ada kendala teknis, seberapa cepat tim IT/pusat merespons ?

Daftar Pertanyaan Untuk Staff Operator SIPD

1. Melalui saluran apa informasi SIPD disampaikan? Apakah tepat waktu ?
2. Apakah SIPD mudah digunakan? Apakah tampilan antarmuka user-friendly ?
3. Seberapa sering sistem SIPD mengalami error atau down? Apakah sering gangguan ?
4. Bagaimana kecepatan sistem saat input data atau membuka halaman? Apakah lemot ?
5. Berapa kali dalam sehari Bapak/Ibu menggunakan SIPD ?
6. Fitur apa saja dari SIPD yang Bapak/Ibu gunakan? Apakah semua fitur digunakan ?



**Lampiran 2. Daftar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada
Pemerintah Aceh**

No	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
1	Dinas Pendidikan Aceh
2	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
3	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4	Dinas Kesehatan Aceh
5	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
6	Rumah Sakit Jiwa
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
9	Dinas Pengairan Aceh
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah Aceh
12	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
13	Dinas Sosial Aceh
14	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
16	Dinas Pangan Aceh
17	Dinas Pertanahan Aceh
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
19	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
21	Dinas Perhubungan Aceh
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
31	Dinas Peternakan Aceh
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
34	Sekretariat Daerah Aceh
35	Sekretariat DPRA
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
38	Badan Kepegawaian Aceh
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
41	Inspektorat Aceh
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
43	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
44	Dinas Syariat Islam Aceh
45	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
46	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sumber : Olahan Peneliti

Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan Fisip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3070/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.** Sebagai pembimbing I
2. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Cindy Olivia**
- NIM : **220802085**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 5. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Terkait Penggunaan Aplikasi SIPD



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 600.5.4/48/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Implementasi SIPD


Jakarta, 6 Januari 2023
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia
di - Tempat

Dalam rangka optimalisasi implementasi dan peningkatan performa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri mengembangkan SIPD berbasis *microservices* yang telah dilaksanakan *soft launching* SIPD sebagai aplikasi umum SPBE pada tanggal 10 Desember 2022 di Acara Hari Anti Korupsi Sedunia yang telah diselenggarakan oleh Stranas PK.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya dengan mengakses SIPD dimaksud melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



جامعة الرانيري
AR - RANIRY



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Dengan Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh



Gambar 2 Wawancara Dengan Validator Aplikasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh



Gambar 3. Wawancara dengan staff Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terkait aplikasi SIPD



Gambar 4. Pengimputan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Badan Pengelolaan Keuangan di bagian Frondesk